

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	3
1.3. Metodologi	6
2 KETERSEDIAAN PANGAN	11
2.1. Lahan Pertanian	11
2.2. Produksi	14
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	21
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	24
3 AKSES TERHADAP PANGAN	25
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	25
3.2. Akses Transportasi	28
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	30
4 PEMANFAATAN PANGAN	31
4.1. Akses Air Bersih	31
4.2. Akses Tenaga Kesehatan	33
4.3. Dampak (Outcome dari Status Kesehatan)	35
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	38
5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	41
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Pembobotan Komposit	41
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	44
5.4. Perbandingan Hasil Penyusunan Peta FSVA Tahun 2022 dan 2023	44
6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	46
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)	4
Gambar 2.1.	Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Pertanian terhadap Total Lahan	12
Gambar 2.2.	Peta Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Pertanian terhadap Total Lahan	13
Gambar 2.3.	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2022	14
Gambar 2.4.	Produksi Total Serealia Tahun 2018-2022	16
Gambar 2.5.	Produksi Padi Per Kecamatan Tahun 2018-2022	16
Gambar 2.6.	Produksi Jagung Per Kecamatan Tahun 2018-2022	18
Gambar 2.7.	Produksi Ubi Kayu Per Kecamatan Tahun 2018-2022	20
Gambar 2.8.	Produksi Ubi Jalar Per Kecamatan Tahun 2018-2022	20
Gambar 2.9.	Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	22
Gambar 2.10.	Peta Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	23
Gambar 3.1.	Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa	26
Gambar 3.2.	Peta Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa	27
Gambar 3.3.	Peta Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air dan Udara	29
Gambar 4.1	Peta Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga	32
Gambar 4.2	Peta Sebaran Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Desa	34
Gambar 4.3	Grafik Penderita Gizi Buruk	35
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Kematian Bayi, Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022	37
Gambar 5.4	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit	43
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kabupaten 2023	7
Tabel 1.2.	Bobot Indikator Individu	9
Tabel 2.1.	Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Luas Wilayah Desa Berdasarkan Prioritas	12
Tabel 2.2.	Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2022 (Ton)	14
Tabel 2.3.	Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)	15
Tabel 2.4.	Produksi Padi Tahun Tahun 2018-2022 (Ton)	17
Tabel 2.5.	Produksi Jagung Tahun 2018-2022 (Ton)	18
Tabel 2.6.	Produksi Ubi Kayu 2018-2022 (Ton)	19
Tabel 2.7.	Produksi Ubi Jalar 2018-2022 (Ton)	21
Tabel 2.8.	Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prioritas	22
Tabel 3.1.	Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan	25
Tabel 3.2.	Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Skala Prioritas	26
Tabel 4.1.	Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas	31
Tabel 4.2.	Sebaran Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Desa Berdasarkan Skala Prioritas	33
Tabel 4.3.	Penderita Gizi Buruk 2018-2022	36
Tabel 4.4.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022	37
Tabel 5.1.	Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit Tahun 2021	42
Tabel 5.2.	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas	41
Tabel 5.3.	Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit	42
Tabel 5.4.	Perbandingan Hasil Penyusunan FSVA Tahun 2022 dan 2023	44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut gembira atas publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait dan para pemangku kebijakan untuk secara bersama-sama melakukan intervensi melalui program/kegiatan dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan serta penanganan daerah rentan rawan pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Selatan.

Saya berharap penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 tidak hanya dapat dipetakan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan akan tetapi dapat lebih dalam dan mengerucut sehingga tepat sasaran untuk memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada untuk menurunkan tingkat kerawanan pangan di wilayahnya. Selanjutnya diharapkan peta ini dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) dan bahan informasi penting bagi semua pihak, baik instansi pemerintah, BUMN dan masyarakat luas di Kabupaten Lampung Selatan sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan rawan pangan dan gizi dapat diatasi dan tidak berdampak buruk.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Tingkat Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Kalianda, Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.
4. Enam indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten yaitu Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku pertanian terhadap luas lahan total (Pusdatin Kementan diolah BKP, 2019); (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga (Potensi Desa diolah BKP, 2021). Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk (Bappeda Kabupaten Lampung Selatan/Data P3KE, 2023 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, 2022); (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai (Potensi Desa, 2022 dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, 2022). Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga (Bappeda Kabupaten Lampung Selatan/Data P3KE, 2022 dan BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2022); (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk (Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2022 dan BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2022).
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan

klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1 s.d 3 sebanyak 1 desa (0,38%) dari 260 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Desa rentan pangan Prioritas 1 s.d 3 terdiri dari 1 desa (0,38%) terdapat pada Prioritas 3 yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram.
7. Karakteristik desa rentan pangan di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan 1) Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, (2) Rasio Sarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga dan (3) Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat daerah rentan rawan pangan melalui kegiatan produktif dalam rangka peningkatan ekonomi rumah tangga;
 - d. Pemberian bantuan hibah alat dan mesin penunjang usaha rumah tangga; dan Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pengembangan ekono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan (256 desa dan 4 kelurahan) dengan total penduduk sebesar 1.081.115 jiwa pada tahun 2022 yang terdiri dari 552.650 jiwa laki-laki dan 528.465 jiwa perempuan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa pulau antara lain Pulau Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Rimau dan Pulau Kandang dimana yang terluas adalah Pulau Sebuku. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 105°14'- 105°45' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 5°15'-6°Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah daratan Kabupaten Lampung Selatan adalah 2.109,74 km². Secara klimatologis, Kabupaten Lampung Selatan memiliki suhu udara berkisar antara 21,2 °C sampai 35,2 °C. Curah hujan berkisar antara 64,6 - 317,30 mm, tertinggi pada Bulan Januari dan terendah pada Bulan September (Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2023).

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan tergantung pada Sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan paling tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 perannya sebesar 28,72% sementara tahun 2021 sebesar 29,02%. Penurunan ini disebabkan karena beberapa sektor di luar sektor Pertanian mengalami kenaikan kontribusi dibanding Sektor Pertanian. Selain Sektor Pertanian, sektor yang kontribusi terhadap PDRB juga mengalami penurunan tahun 2022 adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari 1,52% menjadi 1,44%, Sektor Industri Pengolahan dari 24,30% menjadi 23,05%, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dari 0,12% menjadi 0,11%, Sektor Informasi dan Komunikasi dari 2,98% menjadi 2,73%, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 1,83% menjadi 1,76%, Sektor Real Estate dari 2,13 menjadi 2,02%, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dari 2,31% menjadi 2,11%, Sektor Jasa Pendidikan dari 2,44% menjadi 2,33%, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dari 0,62% menjadi 0,57%. Sementara sektor-sektor lainnya di luar tersebut mengalami kenaikan kecuali Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Jasa Perusahaan yang kontribusinya tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022, Sektor Pertanian menunjukkan peranan sebesar 28,72%, Sektor Pertambangan dan Penggalian

sebesar 1,44%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 23,05%, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,11%, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,13%, Sektor Konstruksi sebesar 13,27%, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,74%, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,86%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,44%, Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 2,73%, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,76%, Sektor Real Estate sebesar 2,02%, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,09%, Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,11%, Sektor Jasa Pendidikan sebesar 2,33%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,57% dan Sektor Jasa Lainnya sebesar 0,63%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan terakhir

pada tahun 2022. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

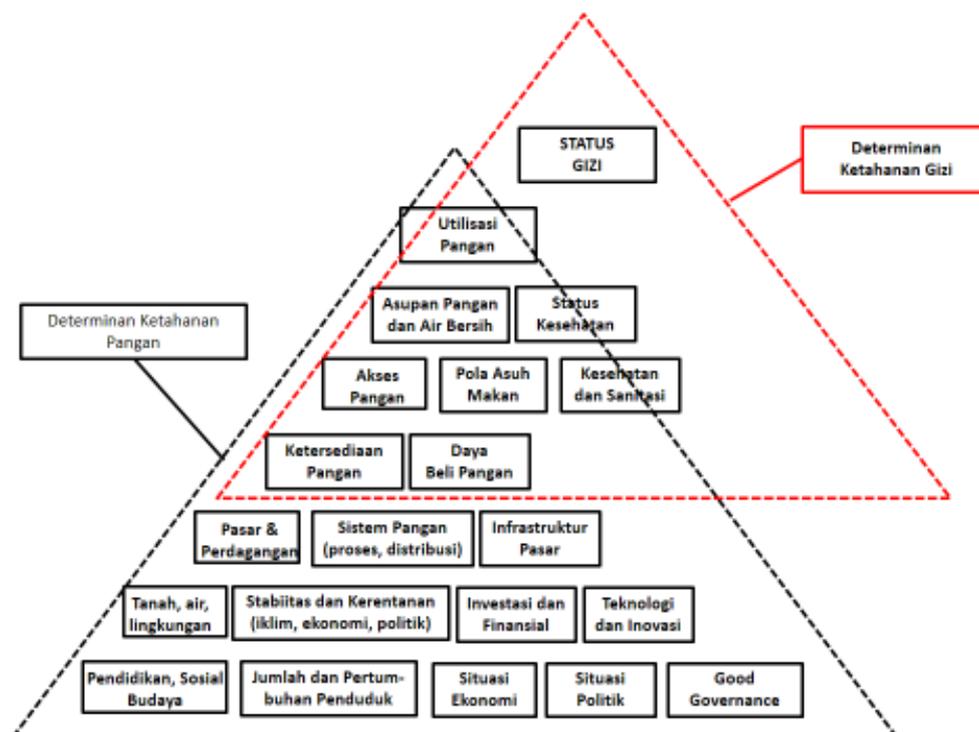
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut

konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition (SCN)*, suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)**

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah,

infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan pertanian dibandingkan luas wilayah desa	Pusdatin Kementan diolah BKP (2019), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2022)
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Pusdatin Kementan diolah BKP (2022)
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1 s.d 3) dibandingkan jumlah penduduk desa	Bappeda Kabupaten Lampung Selatan (Data P3KE, 2022)
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum.	Pusdatin Kementan diolah BKP (2019),
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 3 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Bappeda Kabupaten Lampung Selatan (Data P3KE, 2022)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-j

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-l kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan pertanian dengan luas wilayah desa. Rasio lahan pertanian terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

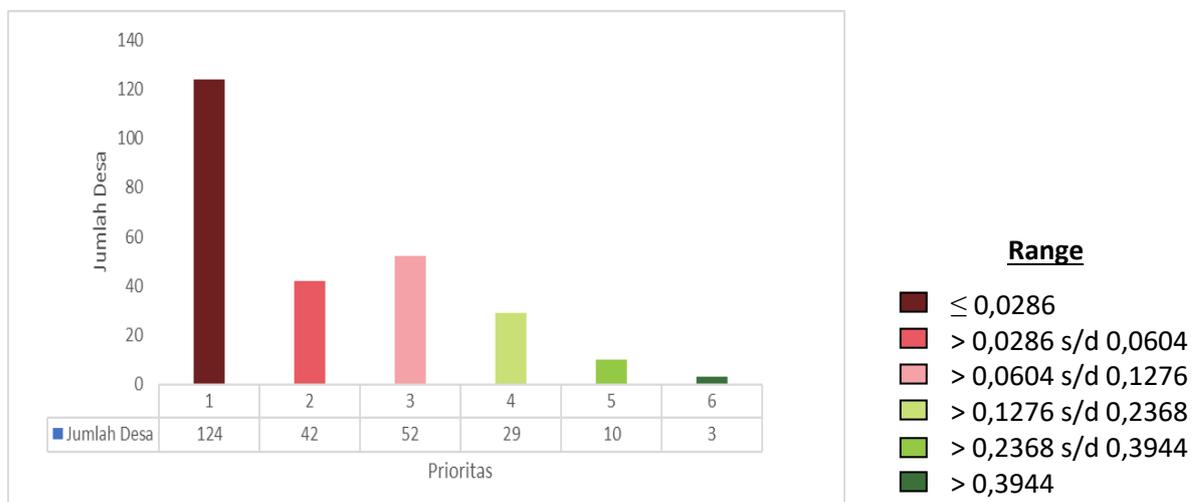
Dari 260 desa/kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kondisi luas baku lahan pertanian, 124 desa masuk dalam prioritas 1 (47,69%), 42 desa prioritas 2 (16,15%), 52 desa prioritas 3 (20,00%). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1 s.d 3 tersebar di 17 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Kalianda dan Natar. Selengkapnya untuk kondisi luas baku lahan pertanian pada

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjadjaran.

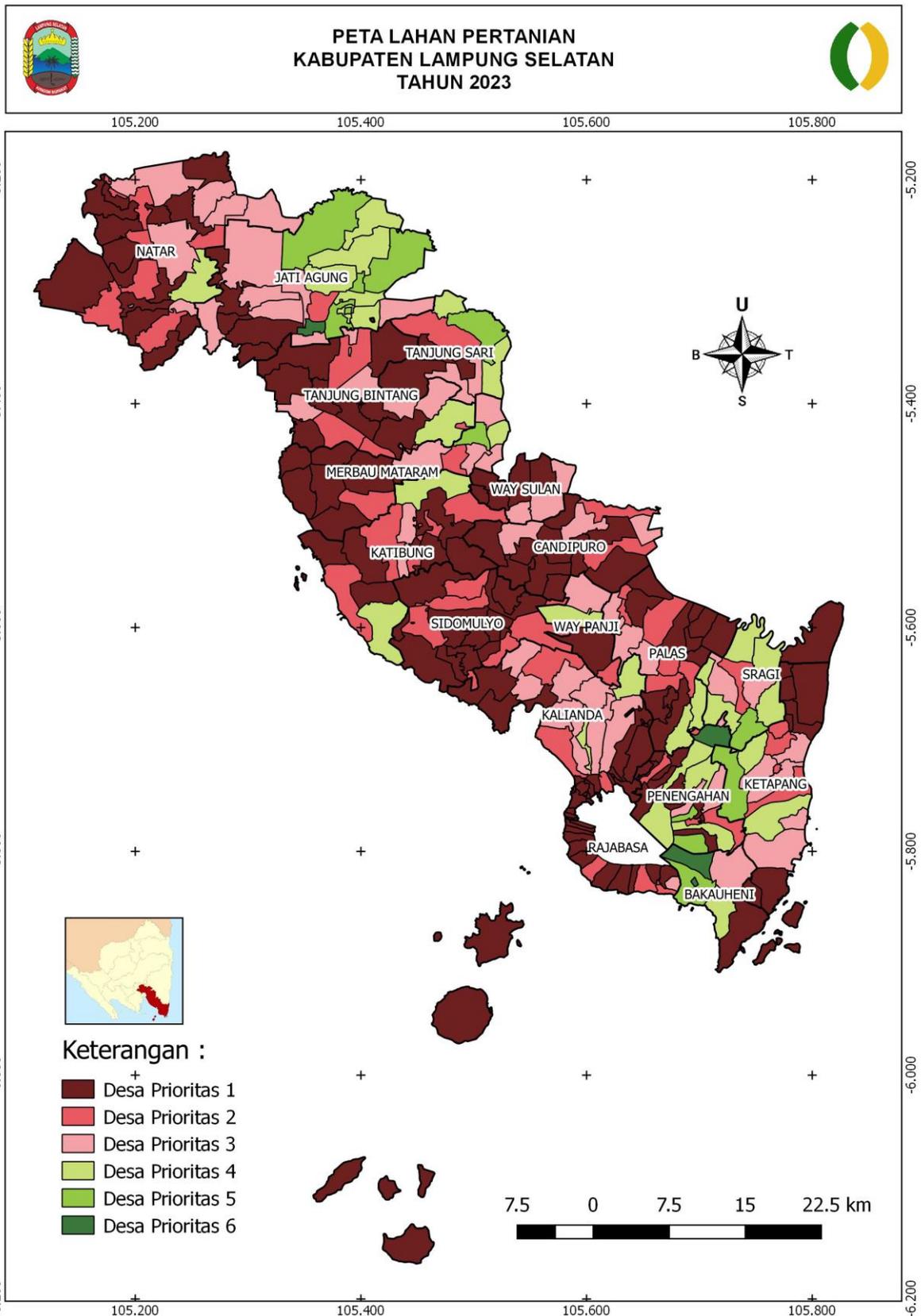
desa/kelurahan sesuai dengan prioritasnya divisualisasikan pada Tabel 2.1. Gambar 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Pertanian Terhadap Luas Wilayah Desa Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0286$	124	47,69
2	$> 0,0286$ s/d $0,0604$	42	16,15
3	$> 0,0604$ s/d $0,1276$	52	20,00
4	$> 0,1276$ s/d $0,2368$	29	11,15
5	$> 0,2368$ s/d $0,3944$	10	3,85
6	$> 0,3944$	3	1,15



Gambar 2.1. Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah Desa



Gambar 2.2. Peta Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Pertanian terhadap Total Lahan

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, perikanan dan kehutanan) telah memberikan kontribusi sebesar 28,72% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Berlaku Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Lampung Selatan yang menyumbang lebih dari 50% dari total produksi serealiala kabupaten.

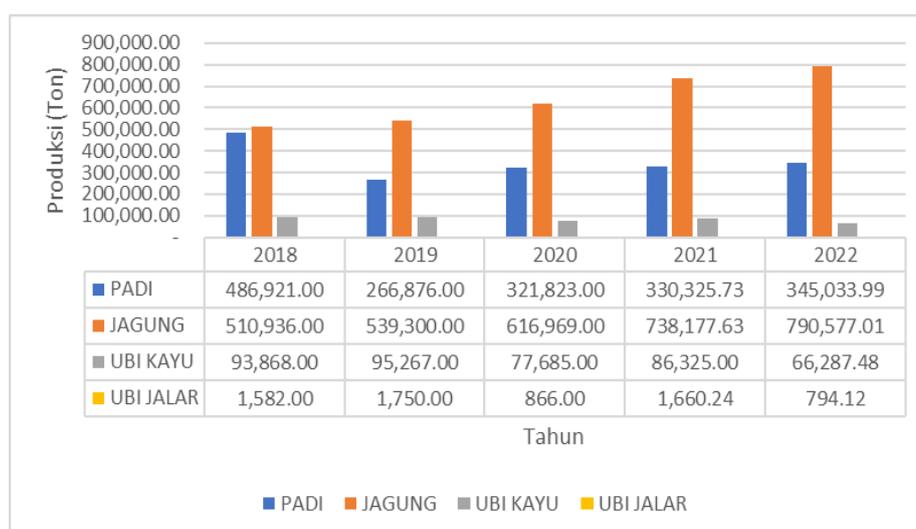
Tabel 2.2. Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2022 (Ton)

No.	Serealiala	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	486.921	266.876*	321.823*	330.326*	345.034
2	Jagung	510.936	539.300	616.969	738.178	790.577
3	Ubi Kayu	93.868	95.267	77.685	86.325	66.287
4	Ubi Jalar	1.582	1.750	866	1.660	794
Jumlah		1.404.143	1.093.307	903.193	1.017.343	1.202.693

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2022)

Ket : *) Data dihitung dengan Metode Kerangka Sample Area (KSA)

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.3. produksi serealiala pokok dan umbi-umbian di Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018 dihitung menggunakan metode Penguatan Data Pangan Strategis (PDPS), Tahun 2019 hingga sekarang dihitung menggunakan Metode Kerangka Sample Area (KSA).



Gambar 2.3. Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2022

Produksi Serealia umumnya mengalami kenaikan dari Tahun 2019 hingga 2022 walaupun pada komoditas Ubi Kayu dan Ubi Jalar mengalami penurunan pada Tahun 2022 akan tetapi selama 5 (lima) tahun terakhir dominan mengalami kenaikan produksi pada semua komoditas serealia utama. Peningkatan dan penurunan pada dan jagung ini utamanya disebabkan adanya penurunan atau kenaikan pada luas tanam dan produktivitas pada komoditas-komoditas yang bersangkutan.

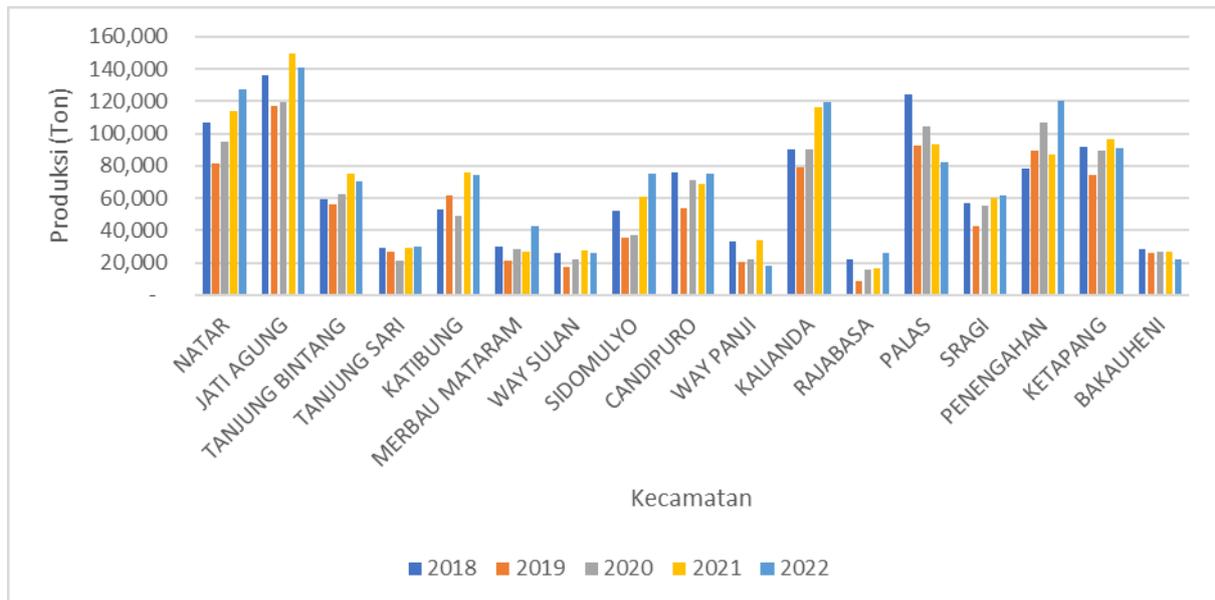
Tabel 2.3. Produksi Total Serealia dan Umbi-umbian per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2018-2022)

No.	Kecamatan	Produksi Total Serealia dan Umbi-umbian					Laju Pertumbuhan 2018-2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Natar	107.041	81.790	95.301	113.740	127.584	-0,13
2	Jati Agung	136.429	116.938	119.451	149.578	140.766	6,25
3	Tanjung Bintang	58.949	55.695	62.814	74.783	70.022	2,36
4	Tanjung Sari	29.074	26.566	21.244	28.819	30.188	-7,39
5	Katibung	52.806	61.361	48.839	75.560	74.562	9,85
6	Merbau Mataram	29.967	20.861	28.648	27.129	42.934	15,40
7	Way Sulan	25.814	17.072	22.387	27.763	26.009	4,77
8	Sidomulyo	52.435	35.861	37.213	60.671	74.985	4,08
9	Candipuro	75.741	53.773	70.966	68.579	75.220	0,39
10	Way Panji	33.465	20.304	22.135	33.874	17.726	-5,83
11	Kalianda	90.140	79.291	90.460	116.235	119.422	7,52
12	Rajabasa	22.045	8.750	15.870	16.414	26.223	18,14
13	Palas	123.909	92.173	104.303	93.097	81.994	-7,76
14	Sragi	56.831	42.780	55.374	59.948	61.958	2,40
15	Penengahan	78.523	89.483	106.424	86.851	120.320	4,78
16	Ketapang	92.126	74.389	89.134	96.379	90.625	-1,21
17	Bakauheni	28.012	26.106	26.780	27.068	22.155	-7,17
Jumlah		1.093.307	903,193	1.017.343	1.156.489	1.202.693	-1,84

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2023)

Tahun 2022 total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 345.034 ton padi, 790.577 ton jagung, 66.287 ton ubi kayu dan 794 ton ubi jalar. Sebaran total produksi serealia pokok dan umbi-umbian selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 149.578 ton di Kecamatan Jati Agung dan terkecil pada tahun 2019 sebesar 8.750 ton di Kecamatan

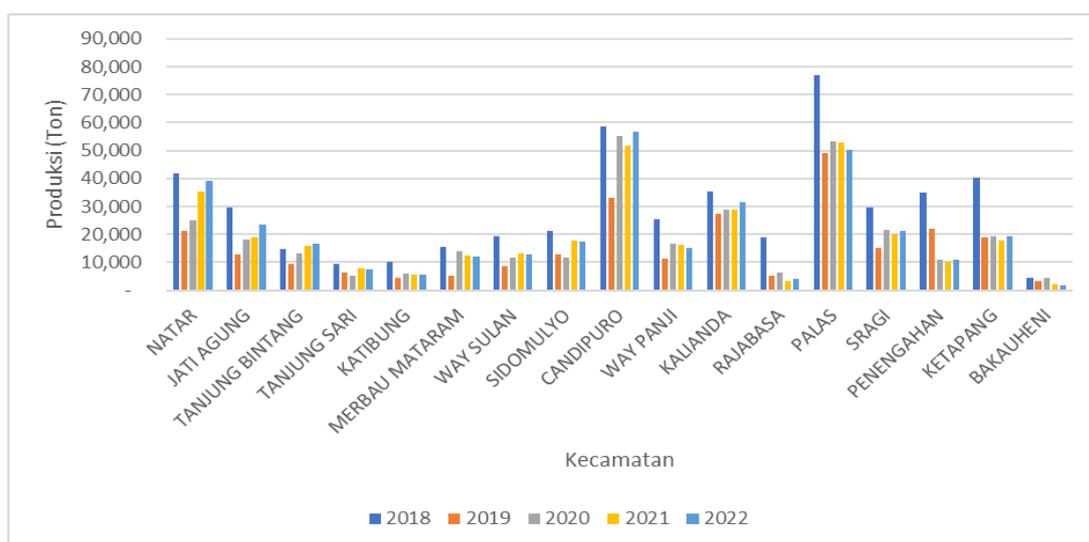
Rajabasa. Produksi sereal-pokok dan umbi-umbian pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Gambar 2.4. Produksi Total Sereal-pokok Per Kecamatan Tahun 2018-2022

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan selama 5 tahun terakhir (2018-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018-2022. Persentase peningkatan produksi tertinggi terjadi di Kecamatan Merbau Mataram pada tahun 2020 sebesar 157,51%. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Palas sebesar 76.980 ton pada tahun 2018.



Gambar 2.5. Produksi Padi Per Kecamatan Tahun 2018-2022

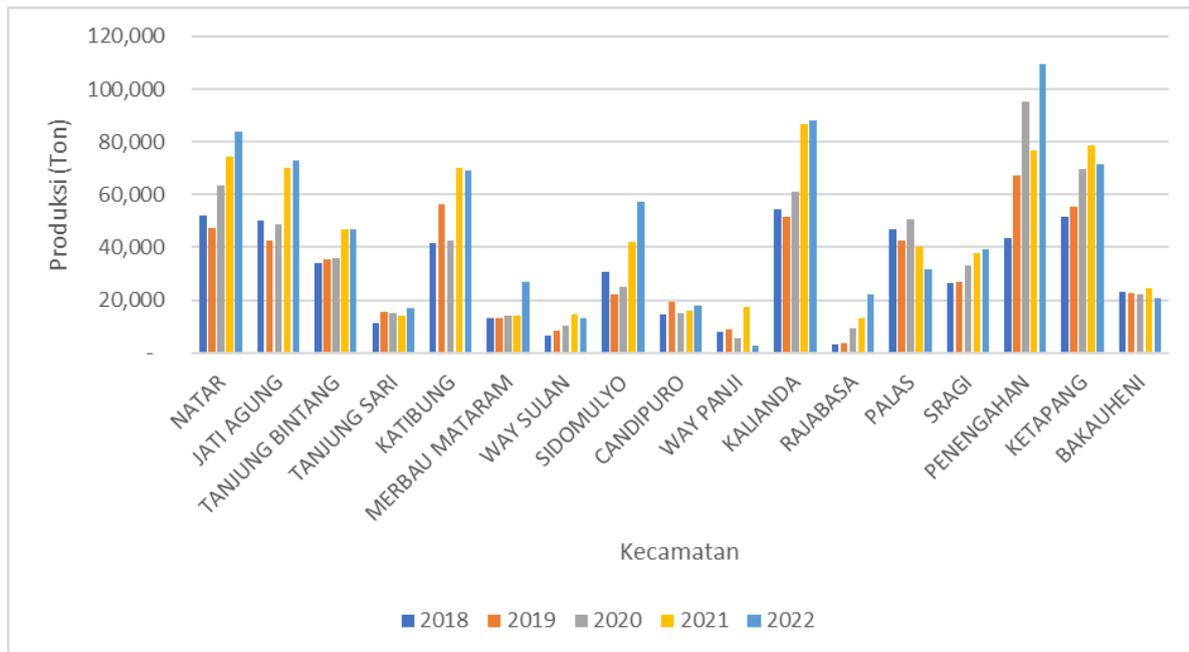
Tabel 2.4. Produksi Padi Tahun Tahun 2018 - 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	Produksi Padi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Natar	42.038	21.409	24.981	35.233	39.064
2	Jati Agung	29.769	12.765	18.170	19.038	23.384
3	Tanjung Bintang	14.773	9.420	13.272	16.052	16.498
4	Tanjung Sari	9.358	6.442	5.344	7.877	7.334
5	Katibung	10.042	4.575	6.082	5.410	5.445
6	Merbau Mataram	15.360	5.373	13.836	12.277	12.226
7	Way Sulan	19.299	8.719	11.770	13.050	13.020
8	Sidomulyo	21.098	12.677	11.505	17.952	17.382
9	Candipuro	58.792	33.085	55.192	51.954	56.674
10	Way Panji	25.491	11.281	16.563	16.292	14.949
11	Kalianda	35.471	27.227	28.783	28.892	31.406
12	Rajabasa	18.762	5.209	6.431	3.242	4.225
13	Palas	76.980	49.264	53.458	52.889	50.239
14	Sragi	29.750	15.313	21.545	19.965	21.323
15	Penengahan	35.167	21.994	11.070	10.070	10.919
16	Ketapang	40.433	18.761	19.491	17.884	19.312
17	Bakauheni	4.338	3.362	4.330	2.249	1.636
Jumlah		486.921	266.876	321.823	330.326	345.034

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2023)

Jagung

Pada tahun 2022, produksi jagung mencapai 790.577 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 7,10% dibandingkan tahun 2021. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 109.401 ton yaitu di Kecamatan Penengahan, sementara pertumbuhan produksi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 175,03% di Kecamatan Rajabasa. Secara rinci produksi jagung tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.5.



Gambar 2.6. Produksi Jagung Per Kecamatan Tahun 2018-2022

Tabel 2.5. Produksi Jagung Tahun 2018 - 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	Produksi Jagung				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Natar	52.102	47.415	63.230	74.530	83.868
2	Jati Agung	50.135	42.567	48.548	69.991	73.106
3	Tanjung Bintang	33.913	35.300	35.829	47.083	46.962
4	Tanjung Sari	11.144	15.421	14.912	13.936	17.044
5	Katibung	41.638	56.126	42.349	69.938	69.075
6	Merbau Mataram	13.112	13.353	14.025	14.192	27.111
7	Way Sulan	6.477	8.309	10.510	14.713	12.989
8	Sidomulyo	30.814	22.069	25.081	42.247	57.389
9	Candipuro	14.475	19.264	15.091	15.952	18.113
10	Way Panji	7.974	9.023	5.572	17.581	2.778
11	Kalianda	54.429	51.815	61.303	86.861	87.936
12	Rajabasa	3.217	3.432	9.439	13.172	21.998
13	Palas	46.851	42.792	50.789	40.178	31.702
14	Sragi	26.482	26.865	33.115	37.866	39.274
15	Penengahan	43.356	67.489	95.354	76.781	109.401
16	Ketapang	51.560	55.606	69.643	78.495	71.313
17	Bakauheni	23.257	22.454	22.179	24.661	20.519
Jumlah		510.936	539.300	616.969	738.178	790.577

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2023)

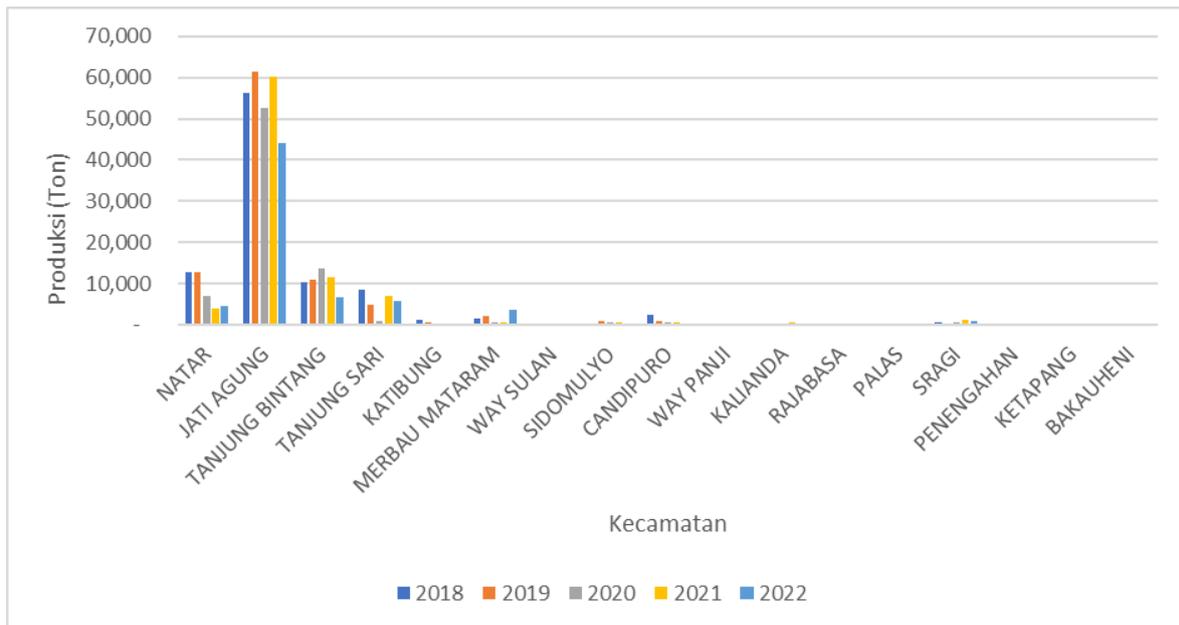
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu mengalami fluktuasi dari Tahun 2018-2022, pada Tahun 2018-2019 dan 2021 masing-masing sebesar 1,49% dan 11,12 %. Akan tetapi pada kurun waktu 2019-2020 dan 2021-2022 mengalami penurunan masing-masing sebesar 18,46% dan 23,21%. Secara keseluruhan selama 5 tahun, produksi Ubi Kayu rata-rata mengalami penurunan sebesar 7,26% dimana produksi Ubi Kayu pada Tahun 2018 sebesar 93.868 ton menjadi sebesar 66.287 ton pada Tahun 2022. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2022 meliputi kecamatan Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang dan Natar. Rata-rata kontribusi produksi kecamatan terhadap produksi kabupaten tertinggi tahun 2018-2022 sebesar 54,15% adalah Kecamatan Jati Agung dan yang terendah sebesar 0,00% adalah Kecamatan Way Panji dan Penengahan. Rincian produksi ubi kayu tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	Produksi Ubi Kayu				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Natar	12.743	12.876	7.090	3.768	4,652
2	Jati Agung	56.322	61.390	52.606	60.302	44,136
3	Tanjung Bintang	10.185	10.939	13.674	11.610	6,562
4	Tanjung Sari	8.572	4.703	988	6.968	5,795
5	Katibung	1.126	660	408	211	26
6	Merbau Mataram	1.369	1.955	645	603	3,520
7	Way Sulan	22	44	107	-	-
8	Sidomulyo	150	989	537	452	213
9	Candipuro	2.317	901	579	482	293
10	Way Panji	-	-	-	-	-
11	Kalianda	177	176	322	482	80
12	Rajabasa	66	109	-	-	-
13	Palas	-	44	43	30	53
14	Sragi	442	350	493	1.295	957
15	Penengahan	-	-	-	-	-
16	Ketapang	133	22	-	-	-
17	Bakauheni	244	109	193	121	-
Jumlah		93.868	95.267	77.685	86.325	66.287

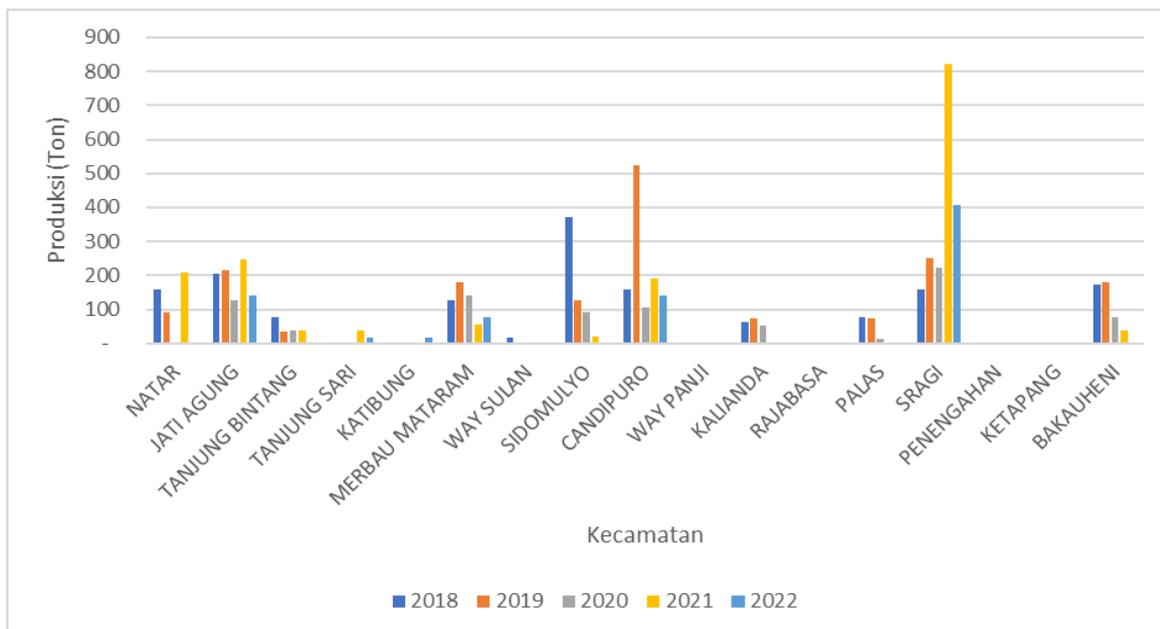
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2023)



Gambar 2.7. Produksi Ubi Kayu Per Kecamatan Tahun 2018-2022

Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022) terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.660 ton. Kecamatan yang merupakan penyumbang terbesar, yaitu Kecamatan Sragi sebesar 822 ton (2021), diikuti Kecamatan Candipuro sebesar 523 ton (2019), Kecamatan Sidomulyo sebesar 373 ton (2018). Rincian produksi ubi jalar tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.7.



Gambar 2.8. Produksi Ubi Jalar Per Kecamatan Tahun 2018-2022

Tabel 2.7. Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

No.	Kecamatan	Produksi Ubi Jalar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Natar	158	90	-	210	-
2	Jati Agung	203	216	127	247	140
3	Tanjung Bintang	78	36	39	38	-
4	Tanjung Sari	-	-	-	38	16
5	Katibung	-	-	-	-	16
6	Merbau Mataram	126	180	142	57	78
7	Way Sulan	16	-	-	-	-
8	Sidomulyo	373	126	90	19	-
9	Candipuro	157	523	104	191	140
10	Way Panji	-	-	-	-	-
11	Kalianda	63	73	52	-	-
12	Rajabasa	-	-	-	-	-
13	Palas	78	73	13	-	-
14	Sragi	157	252	221	822	405
15	Penengahan	-	-	-	-	-
16	Ketapang	-	-	-	-	-
17	Bakauheni	173	181	78	38	-
Jumlah		1.582	1.750	866	1.660	794

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan (2022)

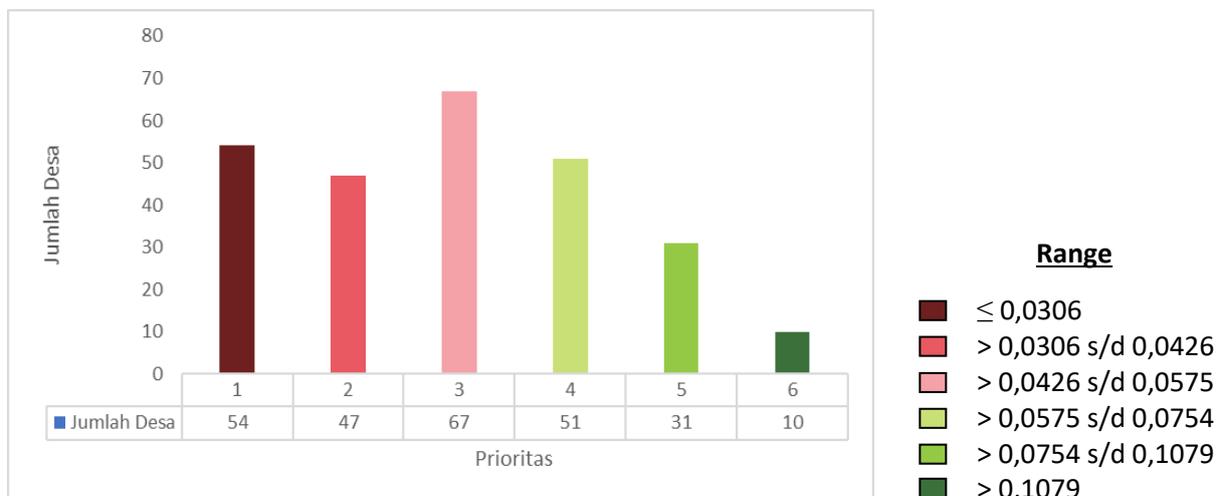
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

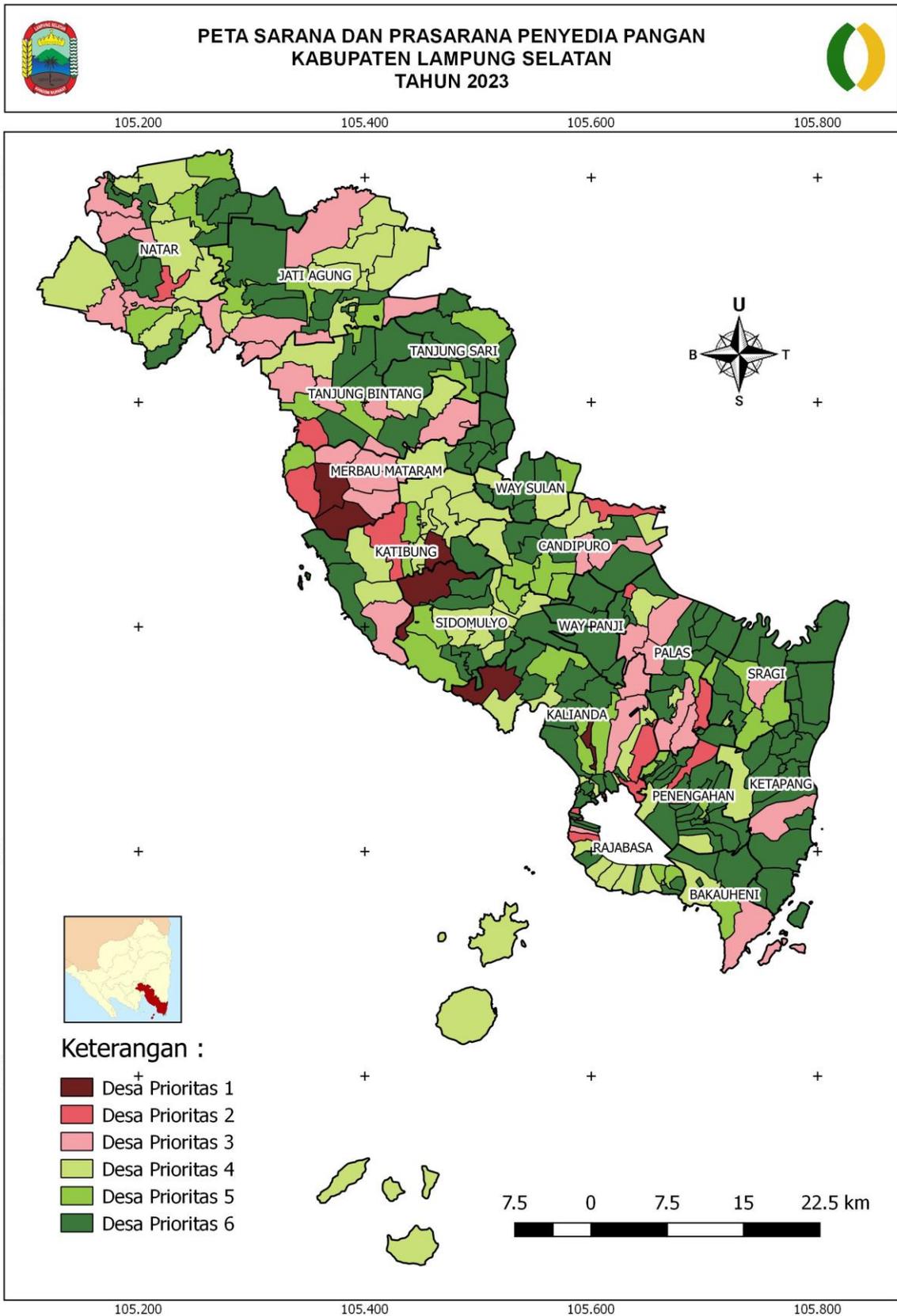
Berdasarkan rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan, dari 260 desa/kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 54 desa/kelurahan yang masuk dalam Prioritas 1 (20,77%), 47 desa masuk dalam Prioritas 2 (18,08%) dan 67 desa masuk dalam Prioritas 3 (25,77%).

Tabel 2.8. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0306$	54	20,77
2	$> 0,0306$ s/d $0,0426$	47	18,08
3	$> 0,0426$ s/d $0,0575$	67	25,77
4	$> 0,0575$ s/d $0,0754$	51	19,62
5	$> 0,0754$ s/d $0,1079$	31	11,92
6	$> 0,1079$	10	3,85



Gambar 2.9. Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga



Gambar 2.10. Peta Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2018-2022 mencapai 1,73% per tahun, pertumbuhan produksi padi Tahun 2019-2022 (Metode KSA) sebesar 9,23%, sementara pertumbuhan produksi jagung Tahun 2018-2022 sebesar 4,54%. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 6,77. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1 s,d 3 mencapai 9,70, Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2018-2022 tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan pada Misi ketiga yaitu Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan perdesaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh. Tujuan ini yang berkaitan dengan ketersediaan pangan selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu : (i) peningkatan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB dan (ii) peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi. Adapun strategi yang akan dilakukan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

- (i) Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan
 - a. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Perluasan areal lahan sawah
 - c. Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura
 - d. Peningkatan populasi sapi potong
 - e. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian (sumber air dan jalan usaha tani)
 - f. Peningkatan adopsi dan inovasi bidang pertanian
 - g. Peningkatan kompetensi kelompok tani
 - h. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan
 - i. Peningkatan volume produksi perikanan tangkap dan budidaya

- (ii) Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi
 - a. Penghitungan skor PPH ketersediaan, energi dan protein
 - b. Menjaga stabilisasi Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen
 - c. Mengupayakan diversifikasi pangan dalam rangka mengurangi konsumsi beras
 - d. Peningkatan keamanan pangan segar dari kandungan cemaran bahan berbahaya yang bersifat biologis, kimia dan fisik

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami penurunan dari 14,86% (148.530 jiwa) tahun 2018 menjadi 13,14% (136.210 jiwa) tahun 2022.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan

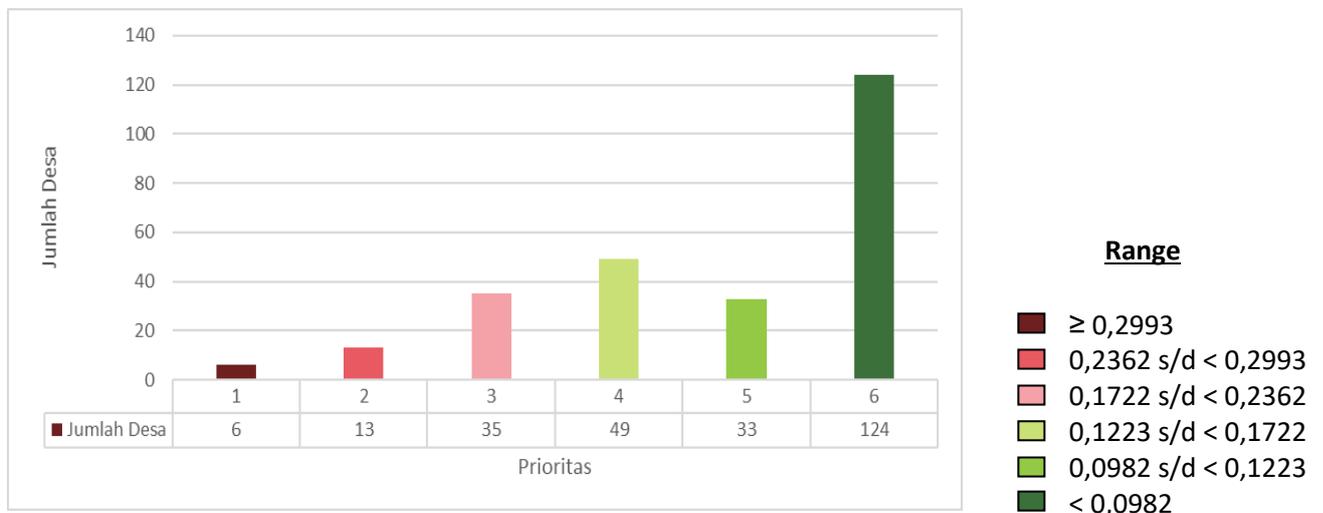
Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin	14,86	14,31	14,08	14,19	13,14

Sumber: BPS, 2023

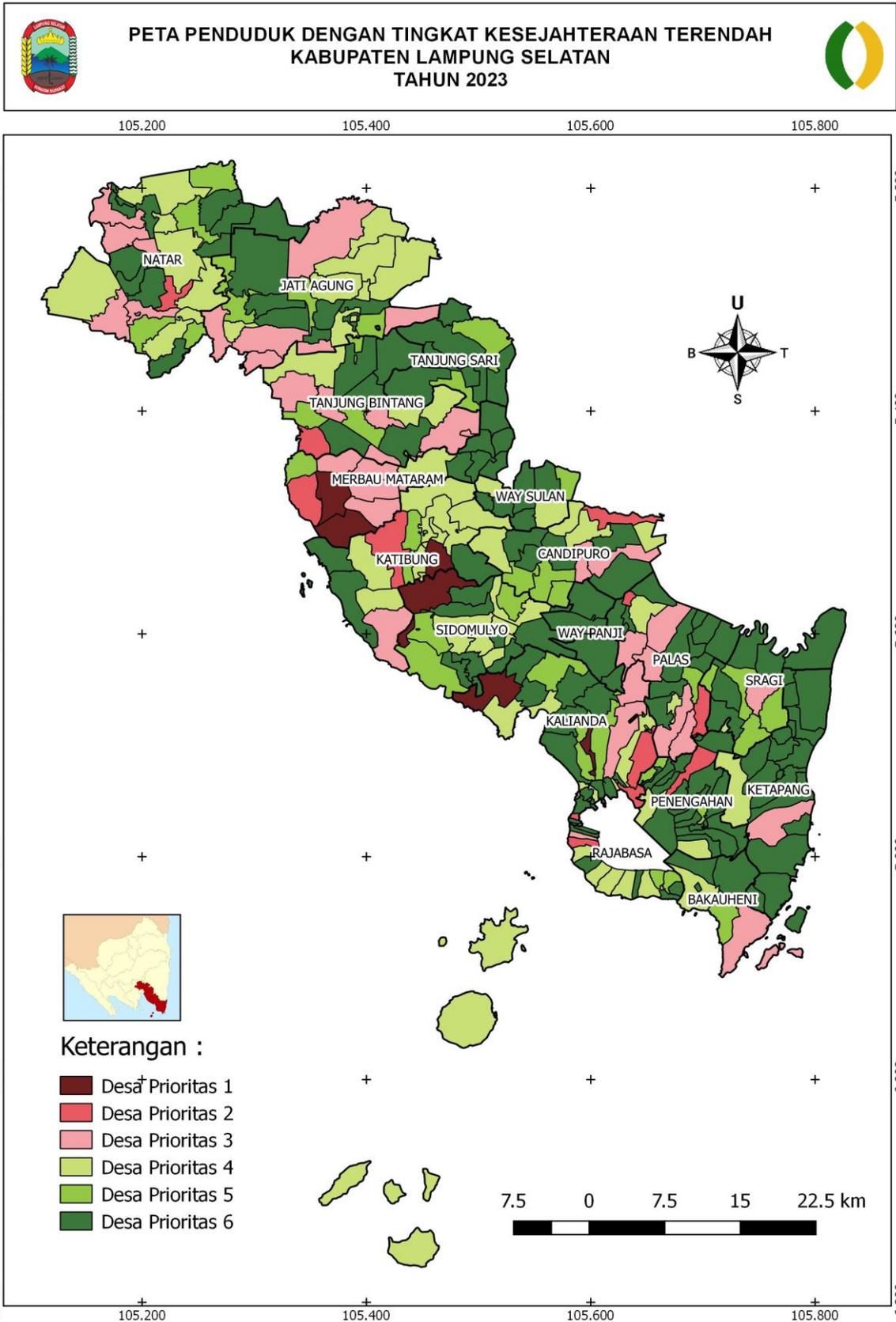
Pada tingkat desa berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023, terdapat 6 desa (2,31%) yang memiliki rasio jumlah penduduk dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas atau sama dengan 0,2993 (Prioritas 1), 13 desa (5,00%) masuk dalam Prioritas 2 dan sebanyak 35 desa (13,46%) masuk prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di desa/kelurahan tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,2993$	6	2,31
2	$0,2362 \text{ s/d } < 0,2993$	13	5,00
3	$0,1722 \text{ s/d } < 0,2362$	35	13,46
4	$0,1223 \text{ s/d } < 0,1722$	49	18,85
5	$0,0982 \text{ s/d } < 0,1223$	33	12,69
6	$< 0,0982$	124	47,69



Gambar 3.1. Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa



Gambar 3.2. Peta Sebaran Rasio Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

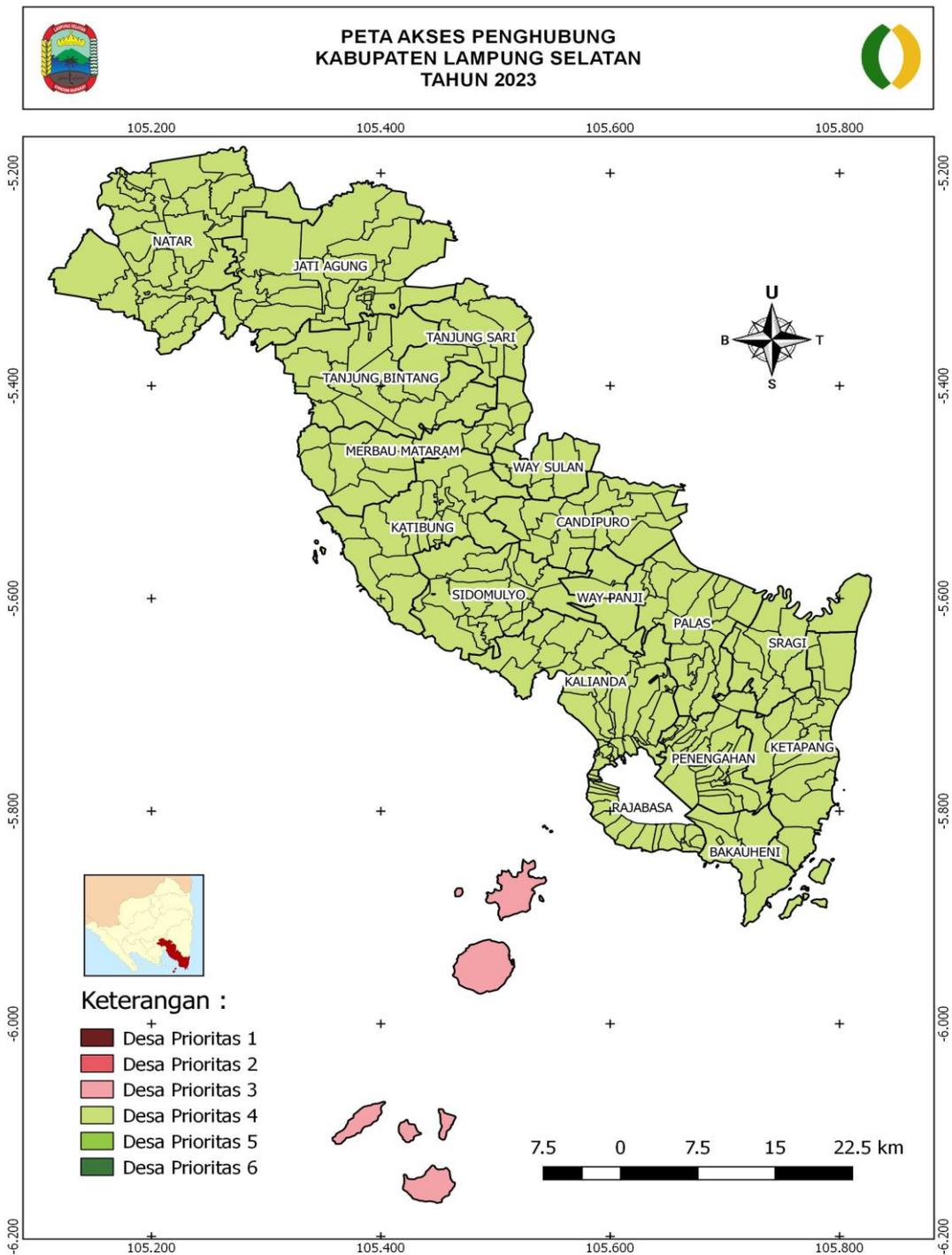
Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, di Kabupaten Lampung Selatan, hampir semua desa memiliki akses penghubung yang bisa dilalui sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll) (Prioritas 2) terdapat di Kecamatan Rajabasa (Desa Tejang Pulau Sebesi), selebihnya desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan memiliki akses penghubung yang dapat dilalui sepanjang tahun (Prioritas 4).

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Selatan akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari

moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kabupaten Rajabasa. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.



Gambar 3.3. Peta Desa Dengan Akses Penghubung Melalui Darat, Air dan Udara

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018-2022 diantaranya :

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir;
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

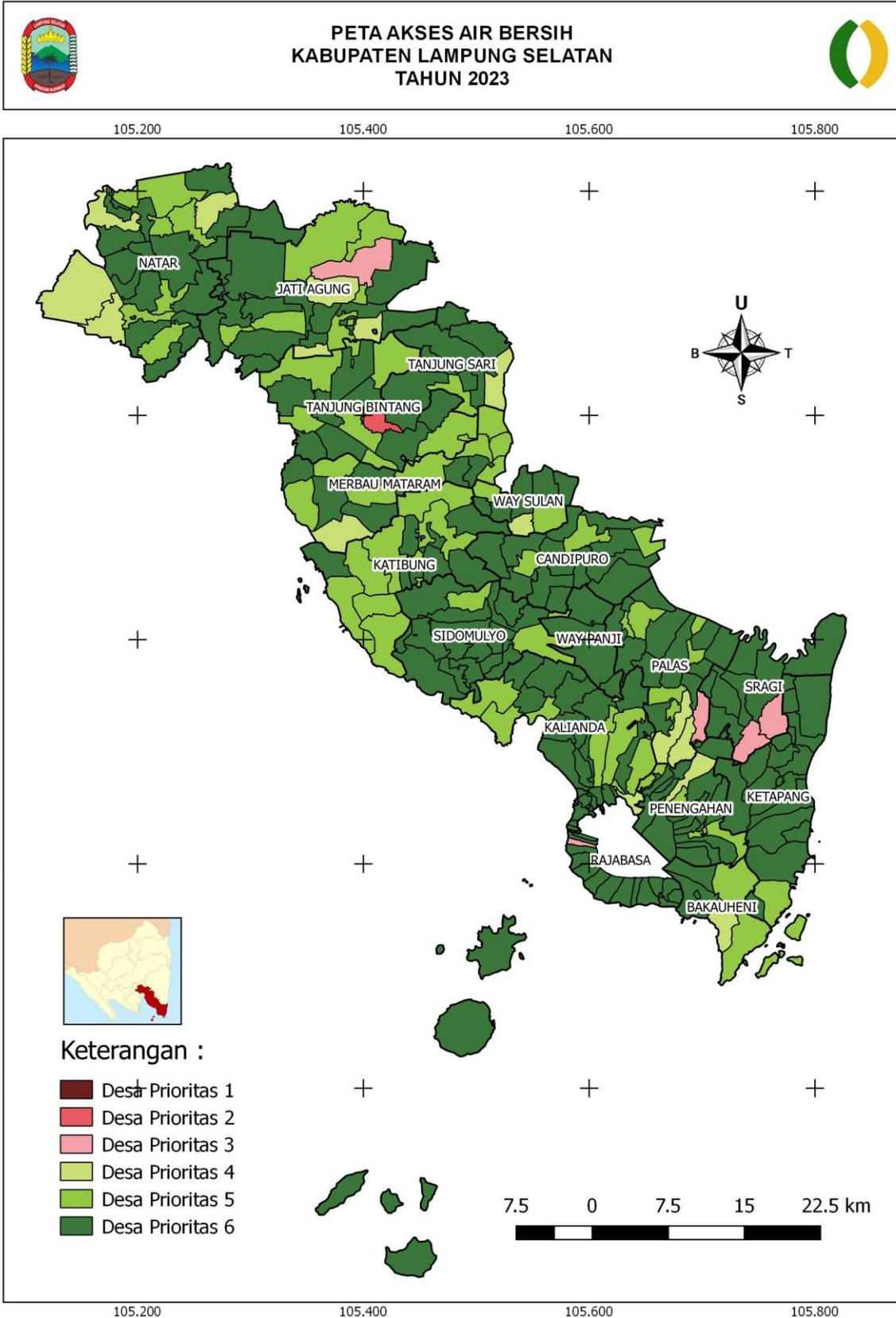
4.1 AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1 s.d 3 dengan sumber air bersih tidak terlindung (Data P3KE) dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,3260$	-	-
2	0,2019 s/d $< 0,3260$	1	0,38
3	0,1123 s/d $< 0,2019$	5	1,92
4	0,0448 s/d $< 0,1123$	15	5,77
5	0,0119 s/d $< 0,0448$	57	21,92
6	$< 0,0119$	182	70,00

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990



Gambar 4.1. Peta Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

4.2. AKSES TENAGA KESEHATAN

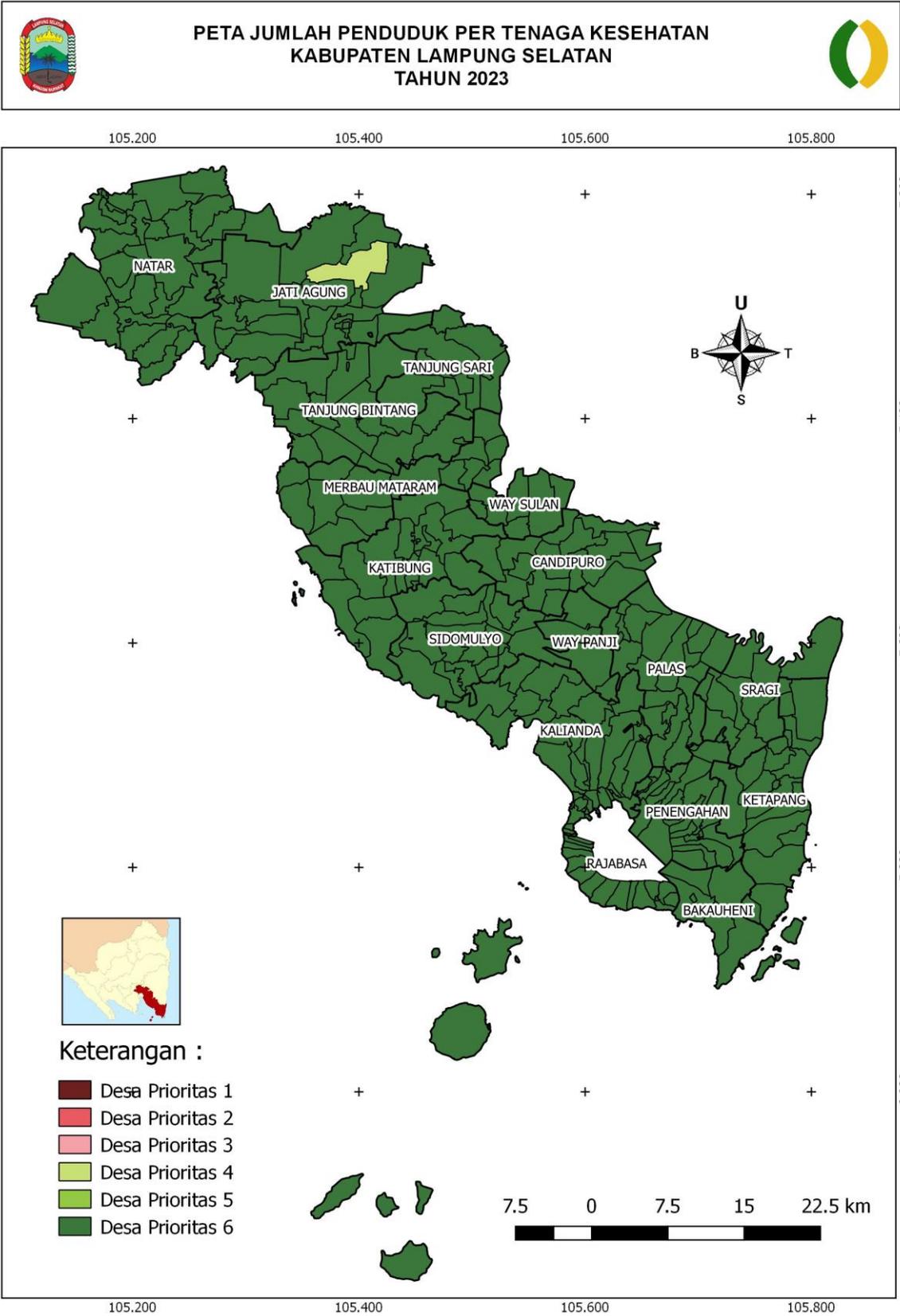
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2. Sebaran Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Desa Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 6,2175$	-	0,00
2	4,0343 s/d $< 6,2175$	-	0,00
3	2,2570 s/d $< 4,0343$	-	0,00
4	1,1741 s/d $< 2,2570$	1	0,38
5	0,7448 s/d $< 0,7448$	-	0,00
6	$< 0,7448$	259	99,62

Sebaran rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan sebanyak 1 desa (0,38%) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan masih masuk dalam prioritas 4 Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tenaga kesehatan di desa sudah cukup jumlahnya akan tetapi tetap perlu dipertahankan. Sebaran desa/kelurahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2.

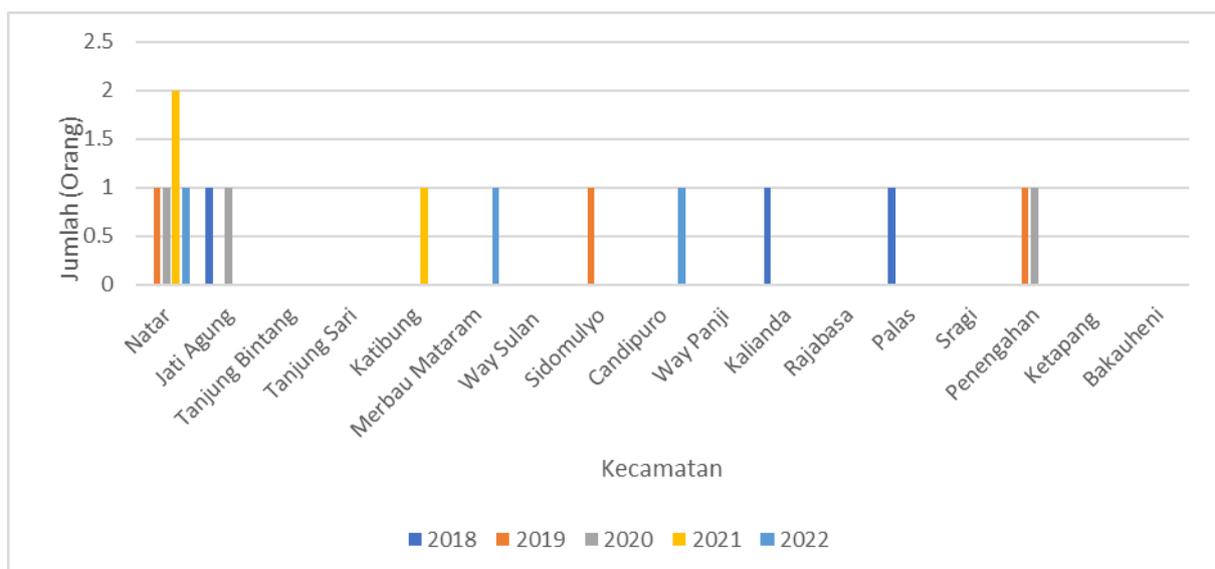


Gambar 4.2. Peta Sebaran Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Desa

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).



Gambar 4.3. Grafik Penderita Gizi Buruk

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018-2022 sebanyak 12 balita. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun masing-masing sebanyak 3 orang setiap tahun yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2018-2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Buruk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Natar	-	1	1	2	1
2	Jati Agung	1	-	1	-	-
3	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-
4	Tanjung Sari	-	-	-	-	-
5	Katibung	-	-	-	1	-
6	Merbau Mataram	-	-	-	-	1
7	Way Sulan	-	-	-	-	-
8	Sidomulyo	-	1	-	-	-
9	Candipuro	-	-	-	-	1
10	Way Panji	-	-	-	-	-
11	Kalianda	1	-	-	-	-
12	Rajabasa	-	-	-	-	-
13	Palas	1	-	-	-	-
14	Sragi	-	-	-	-	-
15	Penengahan	-	1	1	-	-
16	Ketapang	-	-	-	-	-
17	Bakauheni	-	-	-	-	-
Jumlah		3	3	3	3	3

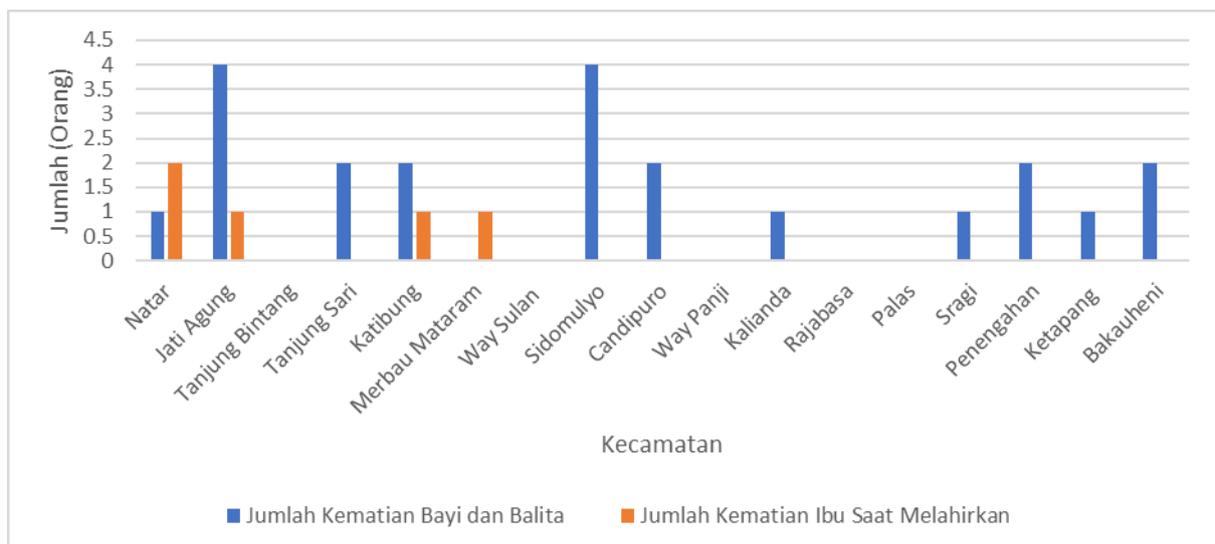
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2022

Angka kematian bayi, balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Pada tahun 2022, ditemukan 22 (dua puluh dua) kasus kematian bayi dan balita di Kabupaten Lampung Selatan, tertinggi sebanyak 4 (empat) kasus yaitu di Kecamatan Jati Agung. Penyebab utama kematian bayi dan balita adalah karena Beras Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan tahun 2022 di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 5 (lima) kasus dengan penyebab utamanya yaitu Eklamsi (Tabel 4.4 dan Gambar 4.4).

Tabel 4.4. Jumlah Kematian Bayi, Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi dan Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Natar	1	2	3
2	Jati Agung	4	1	5
3	Tanjung Bintang	-	-	-
4	Tanjung Sari	2	-	2
5	Katibung	2	1	3
6	Merbau Mataram	-	1	1
7	Way Sulan	-	-	-
8	Sidomulyo	4	-	4
9	Candipuro	2	-	2
10	Way Panji	-	-	-
11	Kalianda	1	-	1
12	Rajabasa	-	-	-
13	Palas	-	-	-
14	Sragi	1	-	1
15	Penengahan	2	-	2
16	Ketapang	1	-	1
17	Bakauheni	2	-	2
Jumlah		22	5	27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2022



Gambar 4.4. Grafik Jumlah Kematian Bayi, Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Lampung Selatan, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
 - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN PEMBOBOTAN KOMPOSIT

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 Prioritas. Prioritas 1 merupakan Prioritas Utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan Prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) Prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada Prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis pembobotan komposit, dari 260 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan didapatkan 1 desa (Prioritas 3), 46 desa (Prioritas 4), 200 desa (Prioritas 5) dan 13 desa (Prioritas 6) (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	-	-
2	-	-
3	1	0,38
4	46	17,69
5	200	76,92
6	13	5,00

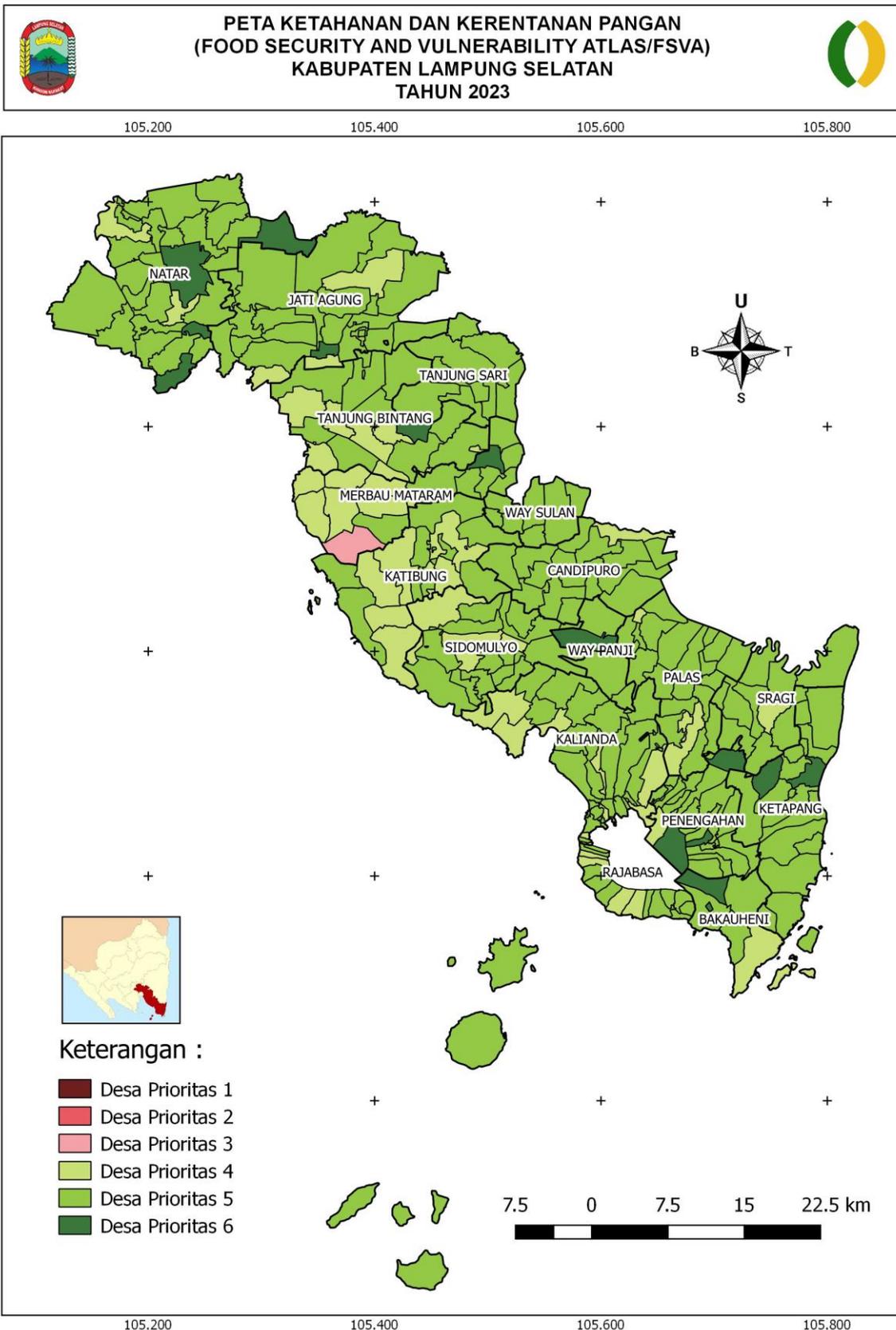
Hasil analisis FSVA Tahun 2023, diperoleh hasil Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 sebanyak 1 (satu) desa, yaitu Desa Mekar Jaya (Kec. Merbau Mataram). Sementara untuk Prioritas 1 dan 2 tidak ada. Sisanya sebanyak 256 desa/kelurahan masuk dalam Prioritas 4-6.

Tabel 5.2. Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit

No.	Kecamatan	Jumlah Desa						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	BAKAUHENI	-	-	-	1	3	1	5
2	CANDIPURO	-	-	-	1	13	-	14
3	JATI AGUNG	-	-	-	3	17	1	21
4	KALIANDA	-	-	-	9	20	-	29
5	KATIBUNG	-	-	-	6	6	-	12
6	KETAPANG	-	-	-	-	15	2	17
7	MERBAU MATARAM	-	-	1	6	7	1	15
8	NATAR	-	-	-	2	21	3	26
9	PALAS	-	-	-	3	18	-	21
10	PENENGAHAN	-	-	-	1	18	3	22
11	RAJABASA	-	-	-	4	12	-	16
12	SIDOMULYO	-	-	-	3	13	-	16
13	SRAGI	-	-	-	1	9	-	10
14	TANJUNG BINTANG	-	-	-	6	9	1	16
15	TANJUNG SARI	-	-	-	-	8	-	8
16	WAY PANJI	-	-	-	-	3	1	4
17	WAY SULAN	-	-	-	-	8	-	8
JUMLAH		-	-	1	46	200	13	260

Berdasarkan pembobotan komposit penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 divisualisasikan pada Tabel 5.3 yang menggambarkan bahwa sebanyak 1 desa (0,38%) yang ada masuk dalam Prioritas 3 yaitu kategori rentan rawan pangan rendah dan 259 desa/kelurahan (99,62%) berada pada Prioritas 4 s.d 6 yaitu kategori tahan pangan rendah hingga tinggi.

Adapun gambaran dalam Peta berdasarkan gradasi warna sesuai dengan Prioritas komposit pada 260 desa/kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan divisualisasikan dalam Gambar 5.1. Pada gambar terlihat bahwa desa/kelurahan dengan kategori semakin rentan rawan pangan memiliki gradasi warna merah muda hingga merah tua, sementara desa-desa yang masuk kategori semakin tahan pangan memiliki gradasi warna hijau muda hingga hijau tua.



Gambar 5.1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Analisis Pembobotan Komposit

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2 dan 3 di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 secara umum disebabkan oleh: (1) Banyaknya penduduk yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, (2) Rasio Sarana Penyedia Pangan terhadap Jumlah Rumah Tangga dan (3) Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Wilayah.

5.4. PERBANDINGAN HASIL PENYUSUNAN PETA FSVA TAHUN 202 DAN 2023

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) tidak dilakukan setiap tahun. Penyusunan Peta FSVA di Kabupaten Lampung Selatan terakhir dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan indikator data dan metode yang sama dengan tahun 2023. Hasil penyusunan Peta FSVA Tahun 2022 dan 2023 dirangkum dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Perbandingan Hasil Penyusunan FSVA Tahun 2022 dan 2023

No.	Kecamatan	2022			2023		
		Prioritas			Prioritas		
		1	2	3	1	2	3
1	BAKAUHENI	-	-	-	-	-	-
2	CANDIPURO	-	-	-	-	-	-
3	JATI AGUNG	-	-	2	-	-	-
4	KALIANDA	-	-	2	-	-	-
5	KATIBUNG	-	2	6	-	-	-
6	KETAPANG	-	-	-	-	-	-
7	MERBAU MATARAM	-	2	1	-	-	1
8	NATAR	-	-	1	-	-	-
9	PALAS	-	1	1	-	-	-
10	PENENGAHAN	-	-	-	-	-	-
11	RAJABASA	-	1	-	-	-	-
12	SIDOMULYO	-	-	1	-	-	-
13	SRAGI	-	-	3	-	-	-
14	TANJUNG BINTANG	-	-	2	-	-	-
15	TANJUNG SARI	-	-	-	-	-	-
16	WAY PANJI	-	-	-	-	-	-
17	WAY SULAN	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	6	19	-	-	1
			25			1	

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah melakukan upaya terpadu melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada desa-desa rentan rawan pangan melalui intervensi berbagai program dan kegiatan sehingga diharapkan seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten yang tahan pangan.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desanya prioritas 3 yang terdapat di Kecamatan Merbau Mataram.
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- c. Desa-desanya di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- e. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal;
- f. Pembukaan lahan pertanian-pertanian baru;
- g. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- h. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan;
- i. Penyediaan tenaga kesehatan;
- j. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pengembangan ekonomi produktif.

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
NATAR										
1	Hajimena	1	6	6	4	6	6	76.79	4	6
2	Suka Damai	3	6	6	4	6	6	73.97	7	6
3	Muara Putih	3	6	4	4	6	6	73.42	9	6
4	Bandarejo	3	5	6	4	6	6	72.47	15	5
5	Wai Sari	2	6	3	4	6	6	71.91	18	5
6	Krawang Sari	4	5	4	4	6	6	71.72	19	5
7	Candi Mas	1	6	6	4	6	6	71.30	23	5
8	Tanjung Sari	2	5	6	4	6	6	70.58	36	5
9	Purwosari	3	5	6	4	4	6	70.21	40	5
10	Mandah	2	4	6	4	6	6	70.16	43	5
11	Natar	1	5	5	4	6	6	69.91	48	5
12	Sidosari	1	5	5	4	6	6	69.45	66	5
13	Pancasila	2	2	6	4	6	6	68.74	89	5
14	Rulung Helok	3	4	4	4	5	6	68.50	96	5
15	Rulung Sari	1	5	4	4	5	6	68.28	105	5
16	Rulung Raya	1	4	5	4	5	6	67.89	117	5
17	Banjar Negeri	1	3	6	4	6	6	67.87	120	5
18	Pemanggilan	2	5	4	4	5	6	67.37	149	5
19	Merak Batin	1	6	3	4	5	6	67.25	152	5
20	Bumi Sari	1	1	6	4	6	6	67.05	162	5
21	Rulung Mulya	1	3	5	4	6	6	66.98	165	5
22	Rejosari	1	5	4	4	4	6	66.44	177	5
23	Branti Raya	1	5	3	4	6	6	65.58	201	5
24	Negara Ratu	2	4	3	4	4	6	65.40	203	5
25	Haduyang	1	4	3	4	4	6	63.60	239	4
26	Kali Sari	1	4	2	4	5	6	62.16	248	4

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
JATI AGUNG										
27	Gedung Harapan	6	3	6	4	6	6	84.47	1	6
28	Gedung Agung	5	3	4	4	5	6	72.36	16	5
29	Purwotani	5	4	4	4	6	6	71.72	20	5
30	Margorejo	4	3	6	4	6	6	71.29	24	5
31	Rejomulyo	3	4	6	4	6	6	70.20	41	5
32	Marga Kaya	3	2	6	4	6	6	69.63	61	5
33	Sumber Jaya	4	2	4	4	4	6	69.36	70	5
34	Margo Mulyo	4	3	5	4	4	6	69.16	75	5
35	Marga Agung	3	2	6	4	5	6	69.09	76	5
36	Margodadi	2	3	6	4	6	6	68.69	91	5
37	Margo Lestari	3	3	5	4	6	6	68.50	97	5
38	Sidoarjo	4	2	4	4	5	6	68.16	109	5
39	Karang Rejo	5	1	3	4	5	6	68.10	111	5
40	Karang Anyar	1	4	5	4	6	6	67.62	135	5
41	Fajar Baru	3	4	3	4	6	6	67.56	137	5
42	Jati Mulyo	1	5	3	4	6	6	66.38	180	5
43	Karang Sari	1	3	4	4	5	6	66.19	184	5
44	Sidodadi Asri	3	4	3	4	6	6	66.05	188	5
45	Sinar Rejeki	4	3	4	4	3	4	64.88	216	4
46	Way Hui	1	2	3	4	6	6	64.18	229	4
47	Banjar Agung	3	2	3	4	4	6	63.50	241	4
TANJUNG BINTANG										
48	Sri Katon	3	6	4	4	6	6	80.68	3	6
49	Rejomulyo	3	4	6	4	6	6	69.39	68	5
50	Galih Lunik	2	4	6	4	6	6	68.83	83	5
51	Lematang	3	4	5	4	5	6	68.38	101	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend. Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
52	Sindang Sari	2	2	6	4	6	6	67.71	129	5
53	Jati Baru	1	3	6	4	6	6	67.50	143	5
54	Purwodadi Simpang	1	3	6	4	5	6	67.37	150	5
55	Trimulyo	3	1	4	4	6	6	65.67	198	5
56	Budi Lestari	4	1	3	4	5	6	65.59	200	5
57	Way Galih	1	3	4	4	5	6	65.34	204	5
58	Serdang	1	1	5	4	5	6	64.68	218	4
59	Sinar Ogan	2	3	3	4	5	6	64.55	222	4
60	Sukanegara	1	1	3	4	6	6	63.66	238	4
61	Sabah Balau	1	1	3	4	6	6	63.52	240	4
62	Kaliasin	1	1	2	4	6	6	61.26	250	4
63	Jati Indah	1	2	3	4	2	6	59.00	256	4
TANJUNG SARI										
64	Mulyosari	5	2	5	4	6	6	72.61	14	5
65	Bangun Sari	4	4	6	4	4	6	71.21	26	5
66	Wawasan	3	4	6	4	6	6	70.50	37	5
67	Malangsari	4	2	6	4	6	6	69.90	49	5
68	Wonodadi	1	4	6	4	6	6	69.89	50	5
69	Sidomukti	3	4	5	4	5	6	69.21	73	5
70	Kertosari	2	1	6	4	6	6	68.30	103	5
71	Purwodadi Dalam	1	1	6	4	6	6	66.90	168	5
KATIBUNG										
72	Neglasari	4	3	4	4	5	6	68.80	87	5
73	Sukajaya	3	4	5	4	6	6	68.26	106	5
74	Tanjung Ratu	2	4	4	4	6	6	67.71	130	5
75	Rangai Tri Tunggal	1	2	6	4	6	6	66.13	186	5
76	Tarahan	2	2	6	4	5	6	66.04	189	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
77	Trans Tanjungan	1	1	6	4	6	6	65.60	199	5
78	Karya Tunggal	4	2	3	4	5	6	64.99	214	4
79	Tanjung Agung	1	1	4	4	5	6	64.43	224	4
80	Babatan	1	1	4	4	5	6	63.84	234	4
81	Sidomekar	1	1	4	4	5	6	63.82	235	4
82	Pardasuka	2	1	2	4	5	6	61.26	251	4
83	Tanjungan	1	2	1	4	6	6	56.95	259	4
MERBAU MATARAM										
84	Sinar Karya	5	3	6	4	5	6	73.03	12	6
85	Batu Agung	4	3	6	4	5	6	69.99	45	5
86	Puji Rahayu	3	3	6	4	5	6	69.20	74	5
87	Lebung Sari	3	3	6	4	6	6	69.06	78	5
88	Panca Tunggal	3	5	4	4	5	6	68.71	90	5
89	Tanjung Harapan	3	4	6	4	5	6	68.29	104	5
90	Talang Jawa	2	2	6	4	6	6	67.67	132	5
91	Karang Raja	2	4	3	4	6	6	65.08	210	5
92	Tanjung Baru	1	1	5	4	6	6	64.52	223	4
93	Merbau Mataram	1	2	3	4	5	6	64.01	231	4
94	Suban	1	4	3	4	5	6	63.92	232	4
95	Triharjo	1	2	3	4	6	6	63.84	233	4
96	Baru Ranji	1	1	2	4	5	6	60.97	252	4
97	Karang Jaya	1	2	1	4	6	6	59.62	254	4
98	Mekar Jaya	1	1	1	4	4	6	49.04	260	3
WAY SULAN										
99	Pamulihan	3	3	6	4	4	6	68.81	85	5
100	Sumber Agung	1	4	6	4	6	6	68.77	88	5
101	Purwodadi	3	3	4	4	5	6	68.16	108	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend. Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadam melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk pertanaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
102	Banjarsari	1	2	6	4	6	6	67.40	148	5
103	Talang Way Sulan	1	3	6	4	6	6	67.35	151	5
104	Sukamaju	3	1	5	4	6	6	66.91	167	5
105	Karang Pucung	1	1	6	4	6	6	66.39	179	5
106	Mekar Sari	1	2	4	4	5	6	65.03	212	5
SIDOMULYO										
107	Sukamarga	2	3	6	4	6	6	68.55	94	5
108	Talang Baru	2	4	6	4	6	6	68.44	98	5
109	Campang Tiga	2	4	6	4	5	6	67.61	136	5
110	Siring Jaha	1	2	6	4	6	6	67.12	159	5
111	Seloretno	1	1	6	4	6	6	66.74	171	5
112	Budidaya	1	2	6	4	6	6	66.14	185	5
113	Banjar Suri	2	1	5	4	6	6	65.81	193	5
114	Sidowaluyo	2	1	6	4	5	6	65.80	194	5
115	Sidomulyo	1	1	5	4	6	6	65.74	195	5
116	Sukamaju	1	3	4	4	6	6	65.71	196	5
117	Suak	1	1	5	4	6	6	65.30	205	5
118	Kota Dalam	1	3	4	4	6	6	65.10	209	5
119	Sidorejo	1	1	4	4	6	6	65.07	211	5
120	Suka Banjar	1	1	4	4	6	6	64.27	227	4
121	Sidodadi	1	1	4	4	6	6	64.22	228	4
122	Bandar Dalam	1	1	1	4	6	6	58.28	258	4
CANDI PURO										
123	Sidosari	1	5	5	4	6	6	68.12	110	5
124	Karya Mulya Sari	3	2	6	4	6	6	67.87	119	5
125	Titiwangi	1	5	3	4	6	6	67.67	133	5
126	Rawa Selapan	1	3	6	4	6	6	67.64	134	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
127	Sinar Palembang	1	3	6	4	5	6	67.56	138	5
128	Bumi Jaya	2	5	3	4	6	6	67.53	140	5
129	Trimomukti	1	3	6	4	6	6	67.51	142	5
130	Banyumas	1	4	4	4	6	6	66.97	166	5
131	Rantau Minyak	1	3	5	4	6	6	66.67	173	5
132	Way Gelam	1	3	5	4	6	6	66.59	174	5
133	Cinta Mulya	1	2	6	4	6	6	66.57	175	5
134	Beringin Kencana	3	3	4	4	5	6	65.82	192	5
135	Batuliman Indah	1	1	4	4	6	6	65.23	207	5
136	Sinar Pasemah	2	3	2	4	6	6	62.52	247	4
WAY PANJI										
137	Sidoreno	4	4	6	4	6	6	73.05	11	6
138	Sidomakmur	2	4	6	4	6	6	70.76	32	5
139	Bali Nuraga	3	4	6	4	6	6	69.63	62	5
140	Sidoarjo	1	3	6	4	6	6	69.39	69	5
KALIANDA										
141	Way Urang	2	6	6	4	6	6	71.67	21	5
142	Gunung Terang	3	3	6	4	6	6	70.14	44	5
143	Wai Lubuk	3	3	6	4	6	6	69.95	46	5
144	Munjuk Sampurna	3	2	6	4	6	6	69.84	53	5
145	Kedaton	3	5	5	4	6	6	69.82	55	5
146	Tengkujuh	1	4	6	4	6	6	69.57	63	5
147	Kesugihan	1	3	6	4	6	6	69.46	65	5
148	Agom	3	1	6	4	6	6	67.86	121	5
149	Pematang	2	1	6	4	6	6	67.86	122	5
150	Sukatani	3	1	6	4	6	6	67.85	123	5
151	Canggu	3	3	5	4	5	6	67.55	139	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
152	Maja	1	3	6	4	6	6	67.43	147	5
153	Taman Agung	2	2	5	4	6	6	67.11	160	5
154	Kalianda	1	5	4	4	6	6	67.07	161	5
155	Bumi Agung	1	2	6	4	6	6	67.04	163	5
156	Tajimalela	3	4	3	4	5	6	66.42	178	5
157	Kecapi	1	3	4	4	6	6	66.29	183	5
158	Sukaratu	1	1	6	4	5	6	66.02	190	5
159	Negeri Pandan	1	2	4	4	6	6	65.69	197	5
160	Margacatur	4	1	3	4	6	6	65.02	213	5
161	Merak Belatung	1	1	4	4	5	6	64.93	215	4
162	Jondong	1	4	3	4	6	6	64.61	220	4
163	Hara Banjar Manis	4	4	1	4	6	6	64.60	221	4
164	Buah Berak	1	1	4	4	6	6	64.17	230	4
165	Palembapang	1	4	2	4	5	6	63.34	242	4
166	Sumur Kumbang	1	4	2	4	6	6	63.08	243	4
167	Pauh Tanjung Iman	1	2	2	4	6	6	62.75	246	4
168	Babulang	1	3	2	4	4	6	61.36	249	4
169	Bulok	1	1	1	4	5	6	59.45	255	4
RAJABASA										
170	Tanjung Gading	1	5	6	4	6	6	70.74	33	5
171	Hargo Pancuran	3	4	6	4	6	6	70.66	34	5
172	Kota Guring	1	5	6	4	6	6	70.29	39	5
173	Banding	1	2	6	4	6	6	68.57	93	5
174	Wai Muli Timur	1	2	6	4	6	6	68.05	113	5
175	Kerinjing	1	4	5	4	6	6	68.03	114	5
176	Rajabasa	2	4	4	4	6	6	67.22	153	5
177	Canti	1	5	4	4	6	6	67.21	155	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
178	Batu Balak	2	2	6	4	6	6	67.16	158	5
179	Tejang Pulau Sebesi	1	6	4	3	6	6	66.51	176	5
180	Kunjir	2	1	4	4	6	6	65.58	202	5
181	Cugung	1	1	5	4	6	6	65.20	208	5
182	Sukaraja	1	1	4	4	6	6	64.41	225	4
183	Way Muli	1	1	4	4	6	6	62.99	244	4
184	Canggung	1	1	2	4	6	6	60.84	253	4
185	Betung	1	1	3	4	3	6	58.91	257	4
PALAS										
186	Tanjung Jaya	3	4	6	4	6	6	71.37	22	5
187	Palas Pasemah	1	5	6	4	6	6	70.61	35	5
188	Bumi Asih	2	4	6	4	5	6	69.86	51	5
189	Rejo Mulyo	2	3	6	4	6	6	68.95	80	5
190	Bandan Hurip	1	3	6	4	6	6	68.85	82	5
191	Pulau Jaya	1	3	6	4	6	6	68.80	86	5
192	Mekar Mulya	1	2	6	4	6	6	68.51	95	5
193	Bumi Daya	3	4	3	4	6	6	67.96	115	5
194	Tanjung Sari	1	4	6	4	6	6	67.95	116	5
195	Kalirejo	3	5	3	4	6	6	67.81	125	5
196	Pulau Tengah	1	1	6	4	6	6	67.79	127	5
197	Palas Aji	2	3	5	4	6	6	67.44	146	5
198	Palas Jaya	1	1	6	4	5	6	67.19	156	5
199	Bangunan	2	3	6	4	5	6	67.17	157	5
200	Sukabakti	4	3	3	4	4	6	66.75	170	5
201	Pematang Baru	4	4	2	4	3	6	66.10	187	5
202	Bumi Restu	1	4	4	4	5	6	65.98	191	5
203	Bali Agung	2	3	3	4	6	6	65.29	206	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
204	Sukamulya	1	2	4	4	5	6	63.80	236	4
205	Bumi Asri	2	3	2	4	6	6	63.70	237	4
206	Sukaraja	1	4	3	4	4	6	62.77	245	4
SRAGI										
207	Marga Jasa	4	3	6	4	6	6	71.11	27	5
208	Sukapura	4	1	6	4	6	6	70.17	42	5
209	Kuala Sekampung	4	1	6	4	6	6	69.85	52	5
210	Margasari	4	3	5	4	6	6	69.80	57	5
211	Mandala Sari	3	3	6	4	6	6	69.08	77	5
212	Sumber Sari	5	1	5	4	3	6	68.26	107	5
213	Bandar Agung	1	1	6	4	6	6	67.84	124	5
214	Baktirasa	2	2	5	4	6	6	67.02	164	5
215	Sumber Agung	4	1	5	4	3	6	66.30	182	5
216	Kedaung	3	1	3	4	6	6	64.30	226	4
PENENGAHAN										
217	Gandri	6	3	6	4	6	6	76.36	5	6
218	Gedung Harta	5	2	6	4	6	6	74.04	6	6
219	Way Kalam	4	3	6	4	6	6	72.80	13	6
220	Klaten	4	5	6	4	6	6	72.20	17	5
221	Suka Baru	4	2	6	4	6	6	70.83	30	5
222	Tanjung Heran	5	2	4	4	6	6	70.81	31	5
223	Pasuruan	1	5	6	4	5	6	69.94	47	5
224	Banjar Masin	3	3	6	4	6	6	69.82	54	5
225	Belambangan	1	5	6	4	6	6	69.81	56	5
226	Tetaan	3	2	6	4	6	6	69.53	64	5
227	Kampung Baru	1	4	6	4	6	6	69.43	67	5
228	Gayam	1	5	5	4	6	6	68.99	79	5

Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

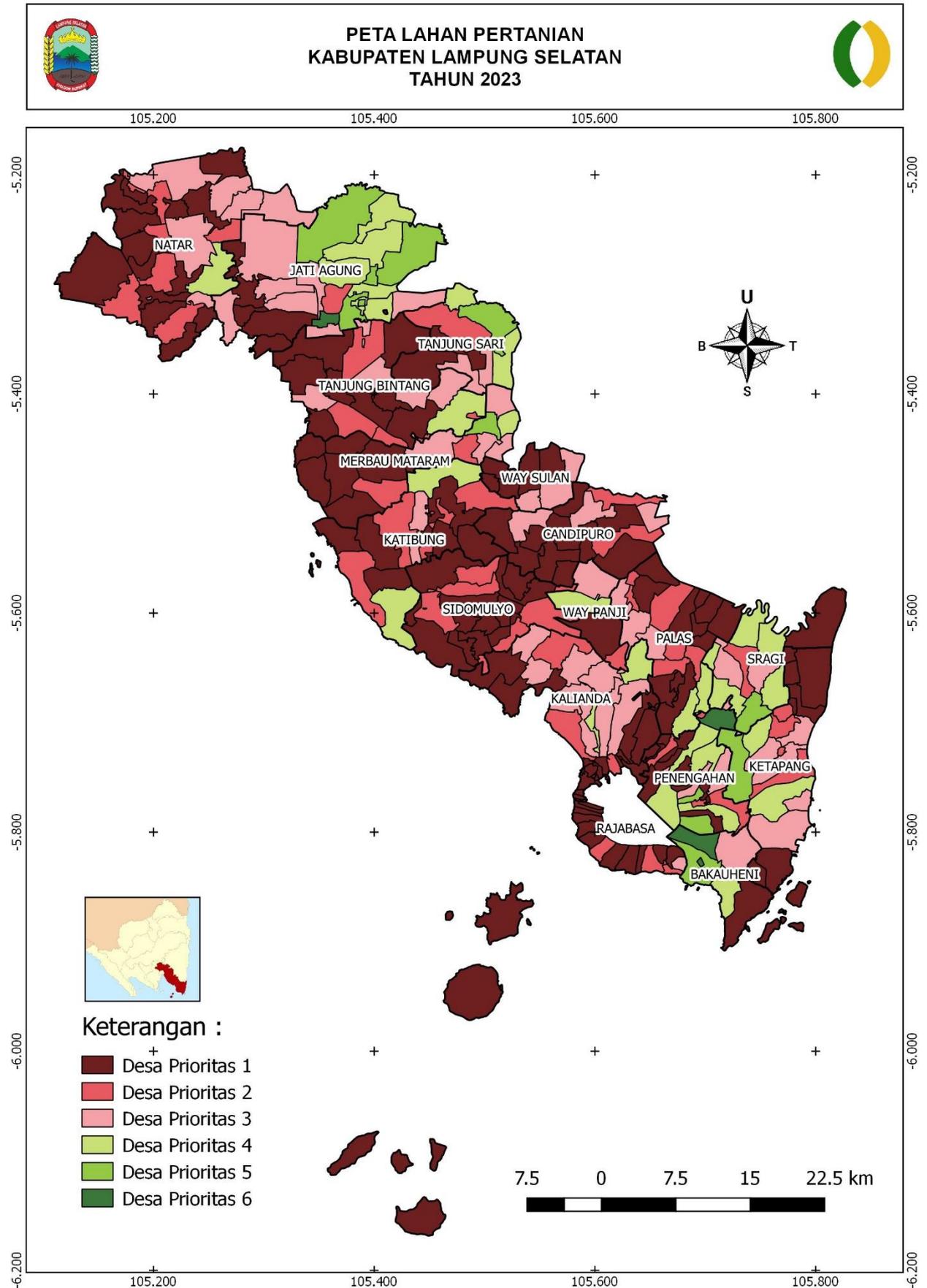
Lampiran 1. Peringkat Desa Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas Ketahanan Pangan Komposit Tahun 2023

No.	Kecamatan/Desa	Lahan	Sarana	Pend. Miskin	Jalan	Air Bersih	Tenkes	Ind. Komp	Peringkat	Prio. Komp
229	Kuripan	1	3	6	4	6	6	67.80	126	5
230	Rawi	2	2	6	4	6	6	67.77	128	5
231	Pisang	1	3	6	4	6	6	67.69	131	5
232	Taman Baru	1	3	6	4	6	6	67.53	141	5
233	Sukajaya	1	3	6	4	5	6	67.50	144	5
234	Penengahan	2	2	6	4	5	6	67.48	145	5
235	Ruang Tengah	4	5	2	4	4	6	67.21	154	5
236	Kelau	3	2	4	4	6	6	66.68	172	5
237	Kekiling	1	3	5	4	5	6	66.30	181	5
238	Padan	1	1	4	4	6	6	64.62	219	4
KETAPANG										
239	Sumber Nadi	3	6	6	4	6	6	73.85	8	6
240	Kemukus	4	3	6	4	6	6	73.21	10	6
241	Karang Sari	5	2	4	4	6	6	71.21	25	5
242	Sidoasih	1	5	6	4	6	6	70.49	38	5
243	Sidoluhur	1	5	6	4	6	6	69.76	58	5
244	Ketapang	2	5	6	4	6	6	69.75	59	5
245	Sripendowo	3	2	6	4	6	6	69.64	60	5
246	Tri Dharma Yoga	3	3	6	4	6	6	69.32	71	5
247	Bangunrejo	3	1	6	4	6	6	69.24	72	5
248	Berundung	1	3	6	4	6	6	68.87	81	5
249	Ruguk	3	3	6	4	6	6	68.81	84	5
250	Lebung Nala	2	4	6	4	6	6	68.60	92	5
251	Pematang Pasir	1	3	6	4	6	6	68.38	99	5
252	Wai Sidomukti	1	3	6	4	6	6	68.38	100	5
253	Sumur	1	3	6	4	5	6	68.31	102	5
254	Taman Sari	2	3	6	4	6	6	67.88	118	5
255	Legundi	4	2	3	4	6	6	66.83	169	5
BAKAUHENI										
256	Semanak	6	4	6	4	6	6	80.90	2	6
257	Toto Harjo	5	4	4	4	6	6	71.04	28	5
258	Kelawi	4	5	5	4	4	6	70.89	29	5
259	Hatta	3	2	6	4	5	6	68.07	112	5
260	Bakauheni	1	4	3	4	5	6	64.74	217	4

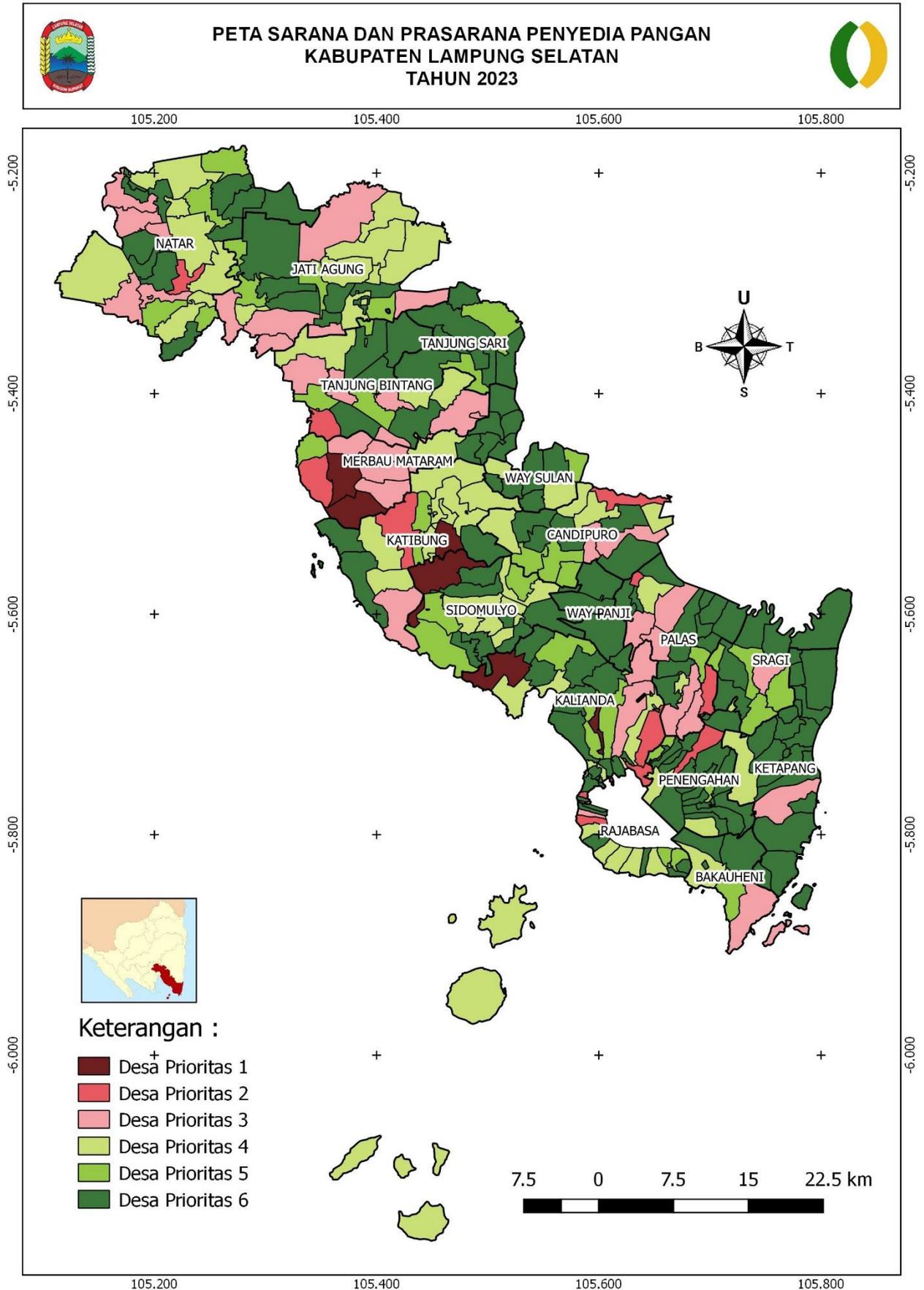
Catatan :

Lahan:	Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa
Sarana:	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
Pend Miskin:	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
Jalan	Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air dan udara
Air Bersih:	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
Tenkes:	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
Ind. Komp:	Indeks komposit
Peringkat:	Peringkat desa

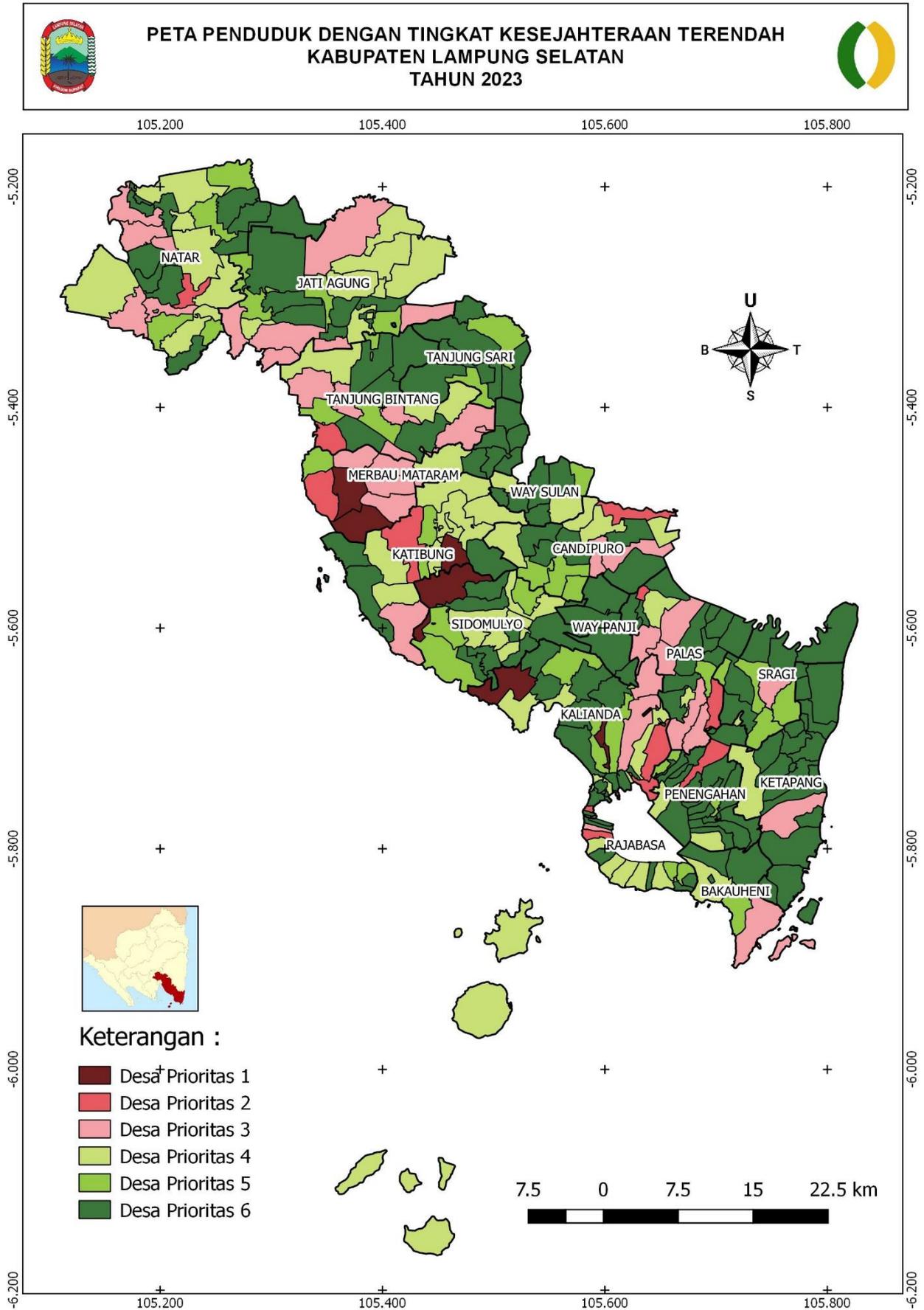
Lampiran 2. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Luas Baku Lahan Pertanian Tahun 2023



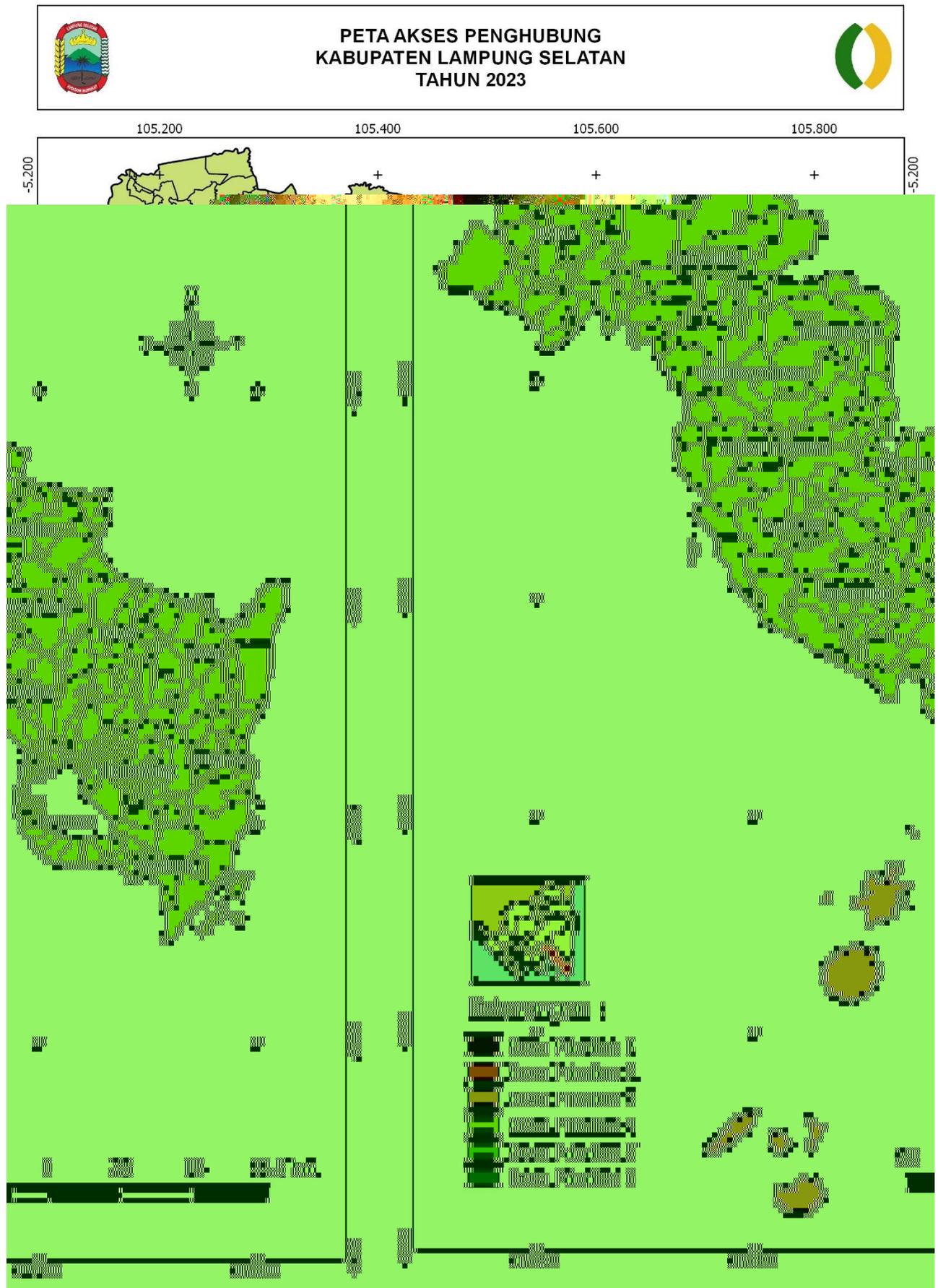
Lampiran 3. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Tahun 2023



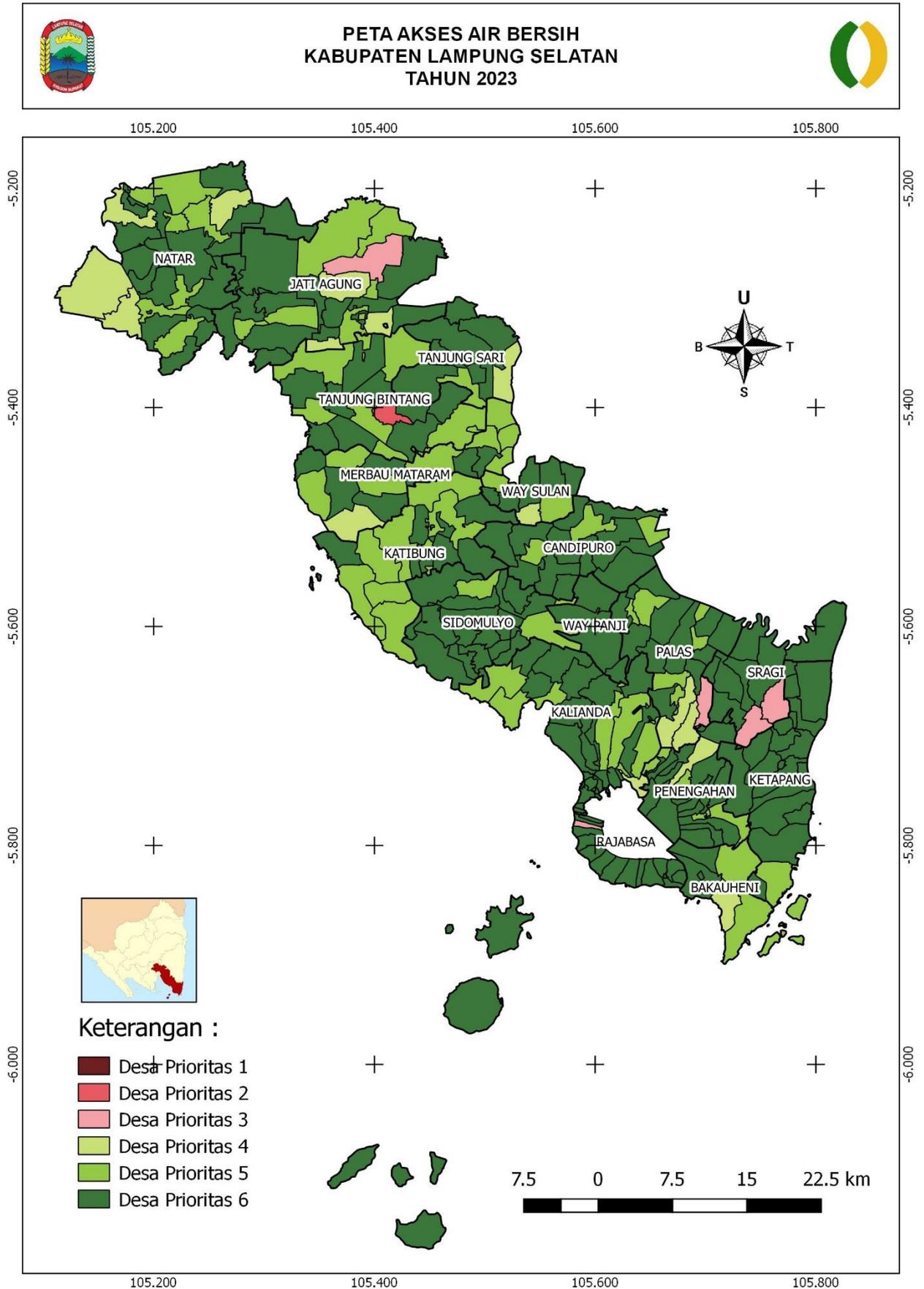
Lampiran 4. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Jumlah Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Tahun 2023



Lampiran 5. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Akses Penghubung Tahun 2023



Lampiran 6. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Tahun 2023

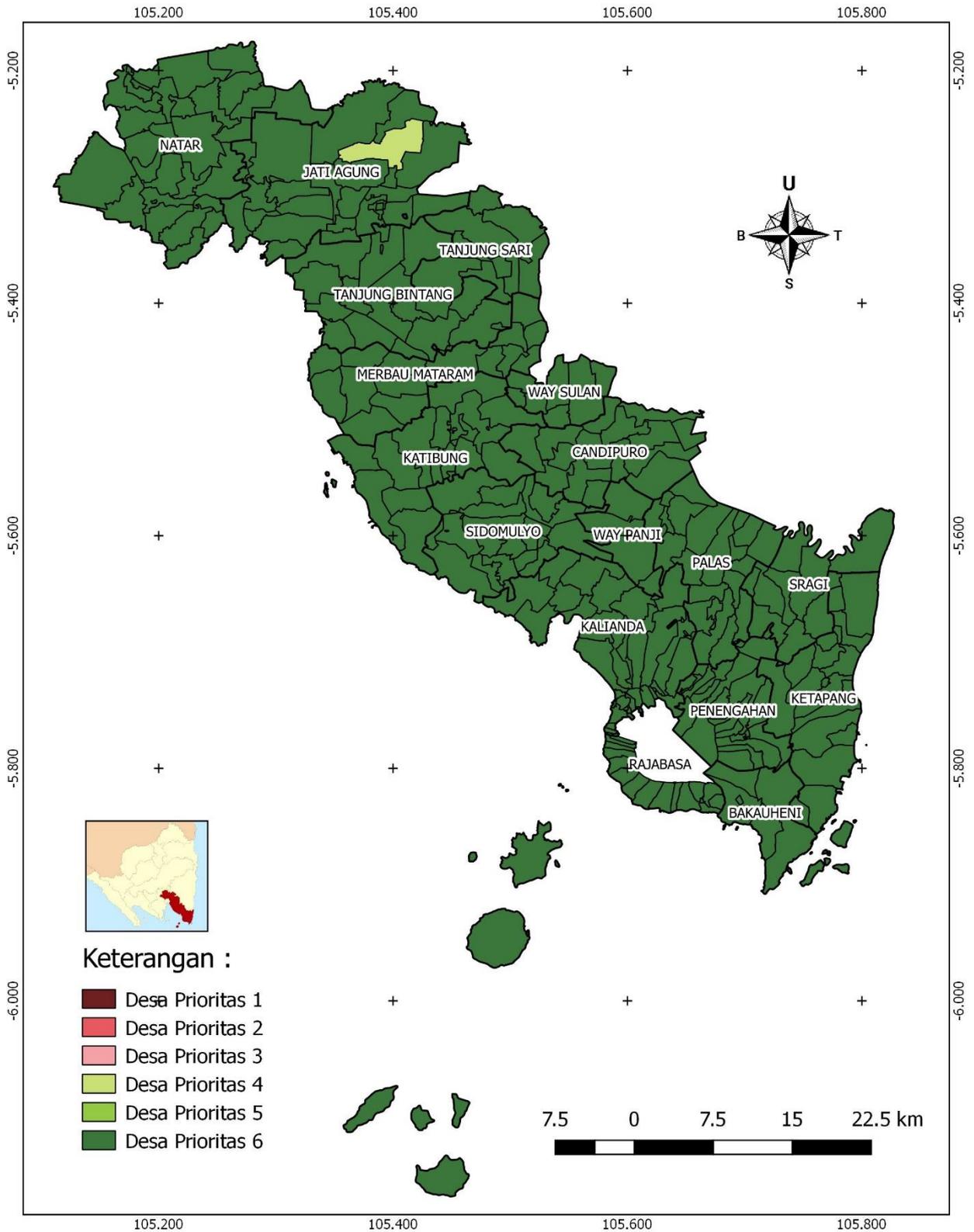


Lampiran 7. Peta FSVA Kabupaten Lampung Selatan Indikator Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Tahun 2023



**PETA JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2023**





**Lampiran 8. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023**

